

**ANALISIS PENGARUH KONVERGENSI IFRS
TERHADAP MANAJEMEN LABA DENGAN
CORPORATE GOVERNANCE SEBAGAI
VARIABEL MODERATING**

**(Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek
Indonesia Tahun 2010-2013)**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Diponegoro

Disusun oleh :

ANGGRAINI DWI NASTITI

NIM. 12030111130117

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2015**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Anggraini Dwi Nastiti
Nomor Induk Mahasiswa : 12030111130117
Fakultas / Jurusan : Ekonomika dan Bisnis / Akuntansi
Judul Skripsi : **ANALISIS PENGARUH KONVERGENSI
IFRS TERHADAP MANAJEMEN LABA
DENGAN CORPORATE GOVERNANCE
SEBAGAI VARIABEL MODERATING**
Dosen Pembimbing : Dr. Dwi Ratmono, S.E., M.Si., Akt.

Semarang, 29 Juni 2015

Dosen Pembimbing,

Dr. Dwi Ratmono, S.E., M.Si., Akt.
NIP. 19801001 200801 1014

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Mahasiswa : Anggraini Dwi Nastiti
Nomor Induk Mahasiswa : 12030111130117
Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/Akuntansi
Judul Skripsi : **ANALISIS PENGARUH KONVERGENSI
IFRS TERHADAP MANAJEMEN LABA
DENGAN CORPORATE GOVERNANCE
SEBAGAI VARIABEL MODERATING**

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 29 Juni 2015

Tim Penguji:

1. Dr. Dwi Ratmono, S.E., M.Si., Akt. (.....)
2. Agung Juliarto, S.E., M.Si., Akt., Ph.D. (.....)
3. Wahyu Meiranto, S.E., M.Si., Akt. (.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Anggraini Dwi Nastiti, menyatakan bahwa skripsi dengan judul: **“ANALISIS PENGARUH KONVERGENSI IFRS TERHADAP MANAJEMEN LABA DENGAN CORPORATE GOVERNANCE SEBAGAI VARIABEL MODERATING”** adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin itu, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 29 Juni 2015
Yang membuat pernyataan,

Anggraini Dwi Nastiti
NIM. 12030111130117

ABSTRACT

The purpose of this research is to analyze the effect of the convergence of IFRS on earnings management by considering the characteristics of corporate governance as a moderating variable. Convergence of IFRS as an independent variable is proxied by using dummy variables. Earnings management is measured using the value of discretionary accruals. Mechanism of corporate governance as a moderating variable considering the characteristics of the commissioners, audit committee, auditor quality and the institutional ownership. This research uses a control variable size, profitability, leverage, and growth.

The sample in this research is manufacturing companies listed in Indonesia Stock Exchange during the period 2010-2013. The sampling method in this research is purposive sampling. The analysis technique in this study using multiple regression analysis.

These results of this study indicate that convergence of IFRS have a significant influence on earnings management with a positive direction. The test results found that the application of IFRS can increase the level of earnings management firms. Thus after IFRS, companies tend to have this level of earnings management is higher. Corporate governance mechanism can moderate the effects of IFRS on earnings management. This is indicated by the effect of the accounting and financial expertise possessed by the audit committee in enhancing the positive effect of IFRS on earnings management.

Keywords: Convergence of IFRS, Earnings Management, Corporate Governance

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh konvergensi IFRS terhadap manajemen laba dengan mempertimbangkan karakteristik *corporate governance* sebagai variabel moderating. Konvergensi IFRS sebagai variabel independen diproksikan dengan menggunakan variabel *dummy*. Manajemen laba diukur dengan menggunakan nilai *discretionary accruals*. Mekanisme *corporate governance* sebagai variabel moderating mempertimbangkan karakteristik dewan komisaris, komite audit, kualitas auditor serta kepemilikan institusional. Penelitian ini menggunakan variabel kontrol *size*, *profitability*, *leverage*, dan *growth*.

Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2010-2013. Metode pengambilan sampel dalam penelitian menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konvergensi IFRS memberikan pengaruh yang signifikan terhadap manajemen laba dengan arah positif. Hasil pengujian mendapatkan bahwa penerapan IFRS justru dapat meningkatkan tingkat manajemen laba perusahaan. Dengan demikian setelah IFRS perusahaan cenderung mempunyai tingkat manajemen laba yang lebih tinggi. Mekanisme *corporate governance* dapat memoderasi pengaruh IFRS terhadap manajemen laba. Hal ini ditunjukkan dengan adanya pengaruh keahlian akuntansi dan keuangan yang dimiliki oleh komite audit dalam meningkatkan pengaruh positif IFRS terhadap manajemen laba.

Kata Kunci: Konvergensi IFRS, Manajemen Laba, *Corporate Governance*

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Intanshurullah Yan Shurkum Wa Yutsabbit Aqdamakum – Barang siapa yang menolong agama Allah, maka Allah akan menolongnya dan meneguhkan pendiriannya” (QS. Muhamamad : 7)

*“Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.”
(QS. Al-Insyirah : 6-8)*

*"Barang siapa yang mengharapkan dunia, maka dengan ilmu,
barang siapa yang mengharapkan akhirat juga dengan ilmu.
Barang siapa yang mengharapkan keduanya, tak lain hanyalah
dengan ilmu" (H.R. Thabrani)*

“Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim” (H.R. Ibnu Majjah)

*“Kecil Terbina, Remaja Terjaga, Muda Berkarya, Tua Sejahtera, Mati Masuk
Surga”*

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

Allah SWT

Nabi Muhammad SAW

Kedua orang tuaku tercinta

Kakak dan Adik-adikku tersayang

Sahabat-sahabatku terkasih

Keluarga Besar Akuntansi UNDIP

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alamin, segala puji bagi Allah Tuhan Semesta Alam. Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan berkah-Nya yang tiada terbatas dalam menyelesaikan skripsi dengan judul **“Analisis Pengaruh Konvergensi IFRS Terhadap Manajemen Laba dengan *Corporate Governance* Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2013)”**. Penulisan skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Jurusan Akuntansi, Universitas Diponegoro, Semarang. Dalam proses penyusunannya segala hambatan yang ada dapat teratasi berkat bantuan, bimbingan, dorongan dan pengarahan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Suharnomo, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
2. Bapak Prof. Dr. H. Muchamad Syafruddin, S.E., M.Si., Akt., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
3. Bapak Dr. Dwi Ratmono, S.E., M.Si., Akt., selaku dosen pembimbing yang telah dengan sabar meluangkan waktu dan banyak memberikan masukan, ilmu, dan nasihat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.

4. Bapak Fuad, SET., M.Si., Ph.D. selaku dosen wali yang telah memberikan banyak bimbingan dan arahan selama masa perkuliahan.
5. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro yang telah memberikan banyak ilmu yang bermanfaat.
6. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro yang turut membantu dalam kelancaran perkuliahan.
7. Bapak Imam Sasmito dan Ibu Lestari Widowati, orang tuaku yang selalu mendoakan, memberikan kasih sayang dan nasihat yang tak pernah putus kepada penulis. Kedua orang tua terhebatku, segala panutanku setelah Rasulullah SAW.
8. Kakak dan adik-adikku (Lia Affia Yustantini, Nurul Asri Royani, dan Reina Rosyida Puspowardhani) yang selalu memberikan doa, hiburan, dan kasih sayang kepada penulis sehingga dapat tetap semangat menyelesaikan skripsi.
9. Sahabat BOBO-ku, teman bermain dan belajar. Cintya Wulandari, Hasna Azizah, Novita Mardyani, dan Widya Indriani. Terimakasih telah menjadi sumber inspirasi dan motivasi bagi penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih telah mengisi hari-hari kuliah saya, tempat menggalau akademis, tempat bercerita dan bertukar pikiran. Semoga kekeluargaan kita tidak pernah hilang sampai kapanpun.
10. Teman-teman yang selalu ada saat senang dan susah, teman-teman seperjuangan dan sebimbingan, Andrie Mustikawati, Bayu Wisnu, Feby Karunia, Fika Ahmad, Galuh Sakuntala, Nanintha Gemala, Rizal Devangga,

Rusdan Radifan, Stevanus Tri Anggoro, Ula Restu, Winarti Sagala, dan semua teman-teman Akuntansi 2011. Terimakasih atas segenap bantuan, doa, dan semangat yang diberikan.

11. An-Nisa Baitussalam (Ana, Anif, Fauzia Dara, Frida, In, Ika, Isma, Kusuma Dara, Lia, Novi, Reny, Shella, Sonja, Tika, Uci) yang telah memberikan banyak bantuan, dukungan, hiburan, dan semangat kepada penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
12. Ar-Rojul Baitussalam (Mas Aam Khumaidi Hambali, Mas Aji Nurhafid, Mas Anba Hudaya, Mas Dimas, Mas Iqbal, Afdi, Angga, Anwar, Arifin, Aziz, Fendi, Yayan) yang telah memberikan dukungan, doa dan hiburan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
13. Rekan-rekan *Green Light Army #2* AIESEC LC UNDIP (Kak Erin, Kak Rigiz, Mas Rangkum, Kak Tedo, Evi, Kak Lalita) yang telah memberikan semangat dan inspirasi serta dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
14. Rekan-rekan KKN Kecamatan Borobudur (Mas Mustofa, Mba Veryne, Imanuel Gulo, Akram, Arga, Wuning, Umi, Dedi) yang telah memberikan inspirasi dan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
15. Seluruh pihak yang telah memberikan bantuan secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis.

Semarang, 29 Juni 2015

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
<i>ABSTRACT</i>	v
ABSTRAK.....	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	11
1.3.1 Tujuan Penelitian	11
1.3.2 Kegunaan Penelitian.....	12
1.4 Sistematika Penulisan.....	13
BAB II.....	16
TELAAH PUSTAKA.....	16
2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu.....	16

2.1.1	IFRS	16
2.1.2	<i>Agency Theory</i>	21
2.1.3	Manajemen Laba.....	23
2.1.4	<i>Corporate Governance</i>	28
2.1.5	Pertumbuhan Perusahaan (<i>Growth</i>)	41
2.1.6	<i>Leverage</i>	41
2.1.7	Ukuran Perusahaan (<i>Size</i>)	42
2.1.8	Profitabilitas	43
2.1.9	Penelitian Terdahulu	44
2.2	Rerangka Pemikiran	49
2.3	Hipotesis	49
2.3.1	Pengaruh Konvergensi IFRS Terhadap Manajemen Laba.....	49
2.3.2	Pengaruh Konvergensi IFRS Terhadap Manajemen Laba dengan Proporsi Dewan Komisaris Independen Sebagai Variabel Moderasi.....	50
2.3.3	Pengaruh Konvergensi IFRS Terhadap Manajemen Laba dengan Jumlah Rapat Dewan Komisaris Sebagai Variabel Moderasi	51
2.3.4	Pengaruh Konvergensi IFRS Terhadap Manajemen Laba dengan Ukuran Dewan Komisaris Sebagai Variabel Moderasi	52
2.3.5	Pengaruh Konvergensi IFRS Terhadap Manajemen Laba dengan Proporsi Komite Audit Independen Sebagai Variabel Moderasi....	53
2.3.6	Pengaruh Konvergensi IFRS Terhadap Manajemen Laba dengan Proporsi Komite Audit yang Memiliki Keahlian Akuntansi dan Keuangan Sebagai Variabel Moderasi	54
2.3.7	Pengaruh Konvergensi IFRS Terhadap Manajemen Laba dengan Jumlah Rapat Komite Audit Sebagai Variabel Moderasi	54

2.3.8	Pengaruh Konvergensi IFRS Terhadap Manajemen Laba dengan Kualitas Auditor Sebagai Variabel Moderasi	55
2.3.9	Pengaruh Konvergensi IFRS Terhadap Manajemen Laba dengan Kepemilikan Saham Institusional Sebagai Variabel Moderasi.....	56
BAB III.....		57
METODE PENELITIAN.....		57
3.1	Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel.....	57
3.1.1	Variabel Dependen.....	58
3.1.2	Variabel Independen	60
3.1.3	Variabel Moderating	61
3.1.4	Variabel Kontrol.....	65
3.2	Populasi dan Sampel	66
3.3	Jenis dan Sumber Data	67
3.4	Metode Pengumpulan Data	67
3.5	Metode Analisis.....	67
3.5.1	Statistik Deskriptif	67
3.5.2	Uji Beda <i>T-test</i>	68
3.5.3	Uji Asumsi Klasik.....	68
3.5.4	Analisis Regresi	73
3.5.5	Uji Hipotesis	75
BAB IV.....		78
HASIL DAN ANALISIS		78
4.1	Deskripsi Objek Penelitian	78
4.2	Analisis Data	79
4.2.1	Analisis Statistik Deskriptif	79

4.2.2	Uji Beda <i>T-test</i>	85
4.2.3	Pengujian Asumsi Klasik	86
4.2.4	Hasil Pengujian Regresi Berganda.....	95
4.3	Intepretasi Hasil.....	101
4.3.1	Pengaruh Adopsi IFRS terhadap Manajemen Laba.....	102
4.3.2	Pengaruh Dewan Komisaris Independen Dalam Memoderasi Konvergensi IFRS terhadap Manajemen Laba	103
4.3.3	Pengaruh Jumlah Rapat Dewan Komisaris Dalam Memoderasi Konvergensi IFRS terhadap Manajemen Laba	104
4.3.4	Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris Dalam Memoderasi Konvergensi IFRS terhadap Manajemen Laba	105
4.3.5	Pengaruh Komite Audit Independen Dalam Memoderasi Konvergensi IFRS terhadap Manajemen Laba	106
4.3.6	Pengaruh Komite Audit yang Memiliki Keahlian Akuntansi dan Keuangan Dalam Memoderasi Konvergensi IFRS terhadap Manajemen Laba.....	107
4.3.7	Pengaruh Jumlah Rapat Komite Audit Dalam Memoderasi Konvergensi IFRS terhadap Manajemen Laba	109
4.3.8	Pengaruh Kualitas Auditor Dalam Memoderasi Konvergensi IFRS terhadap Manajemen Laba	110
4.3.9	Pengaruh Kepemilikan Institusional Dalam Memoderasi Konvergensi IFRS terhadap Manajemen Laba	111
BAB V		113
PENUTUP.....		113
5.1	Kesimpulan.....	113
5.2	Keterbatasan	114
5.3	Saran.....	114

DAFTAR PUSTAKA.....	115
LAMPIRAN A	xix
LAMPIRAN B.....	xxx

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	47
Tabel 3.1 Pengambilan Keputusan Uji Autokorelasi	71
Tabel 4.1 Perolehan Sampel Penelitian.....	79
Tabel 4.2 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian.....	80
Tabel 4.3 Frekuensi Variabel Dummy	84
Tabel 4.4 Hasil Statistik Uji Beda <i>T-test</i>	85
Tabel 4.5 Hasil Uji Beda <i>T-test</i>	86
Tabel 4.6 Uji Kolmogrov-Smirnov (K-S) I	88
Tabel 4.7 Uji Kolmogrov-Smirnov (K-S) II	89
Tabel 4.8 Uji Multikolonieritas (<i>Tolerance</i> dan VIF).....	90
Tabel 4.9 Uji Autokorelasi dengan Lagrange Multiplier (LM test).....	91
Tabel 4.10 Uji Autokorelasi dengan Run Test.....	91
Tabel 4.11 Uji Heterokedastisitas (Uji Glejser).....	94
Tabel 4.12 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F).....	95
Tabel 4.13 Uji Koefisien Determinasi (R^2)	96
Tabel 4.14 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t).....	97
Tabel 4.15 Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis	101

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Rerangka Pemikiran	49
Gambar 4.1 Pola Manajemen Laba	81
Gambar 4.2 Uji Normalitas I (Grafik Normal Plot).....	87
Gambar 4.3 Uji Normalitas II (Grafik Normal Plot).....	88
Gambar 4.4 Uji Heteroskedastisitas (<i>Scatterplot</i>).....	93

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran A Output SPSSxix
Lampiran B Hasil Tabulasi Data.....	..xxx

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perubahan zaman menuntut kecepatan dalam berkomunikasi dan mendapatkan informasi untuk saling berinteraksi, termasuk dalam interaksi dagang dan investasi. Kemajuan teknologi mendorong kemudahan manusia di seluruh dunia untuk berkomunikasi tanpa ada batas wilayah negara atau disebut juga dengan globalisasi. Dampak globalisasi yang semakin kuat dan berimbas kepada pasar-pasar investasi membuat pihak yang terlibat berupaya untuk mempermudah dan menyeragamkan bahasa dalam berinvestasi (bahasa standar pelaporan keuangan). Standar pelaporan keuangan haruslah standar yang dapat diterima dan dipahami oleh masyarakat global sehingga diperlukan standar yang sama di seluruh dunia. Laporan keuangan dituntut untuk dapat memberikan informasi yang dapat dipahami oleh pemakai secara global, sehingga dapat menarik investor melakukan investasi ke dalam perusahaan.

Era globalisasi yang membuat dunia bisnis berkembang dengan dinamisnya, dunia akuntansi sebagai bahasa bisnis juga harus turut berkembang. Hal ini merupakan tuntutan wajar, sehingga kualitas laporan keuangan yang merupakan produk akhir dari akuntansi yang ditujukan kepada investor maupun pemangku kepentingan, tetap tinggi dan bermanfaat dalam pengambilan keputusan. Sebagai konsekuensinya, standar akuntansi keuangan yang berkualitas tinggi

merupakan sesuatu yang mutlak diperlukan. Hal ini yang mendorong perubahan standar akuntansi keuangan nasional kepada standar akuntansi keuangan yang baru yakni IFRS (Gamayuni, 2009). Menurut Ball (2006):

IFRS menjanjikan informasi laporan keuangan yang lebih akurat, komprehensif dan tepat waktu, dibandingkan dengan standar nasional yang digunakan sebelumnya dalam pelaporan keuangan umum yang diadopsi banyak negara, termasuk Benua Eropa. IFRS mengarah pada penilaian yang lebih informatif pada pasar modal, sehingga mengurangi risiko bagi investor dalam pengambilan keputusan yang tidak tepat.

International Financial Reporting Standards (IFRS) merupakan standar pelaporan keuangan internasional yang menjadi rujukan atau sumber konvergensi bagi standar-standar akuntansi di negara-negara di dunia yang diterbitkan oleh *International Accounting Standard Board* (IASB) pada tahun 2001. Standar Akuntansi Internasional (*International Accounting Standards/ IAS*) disusun oleh empat organisasi utama dunia yaitu Badan Standar Akuntansi Internasional (IASB), Komisi Masyarakat Eropa (EC), Organisasi Internasional Pasar Modal (IOSOC), dan Federasi Akuntansi Internasional (IFAC). IFRS sebagai standar internasional memiliki tiga ciri utama yakni *principles-based*, nilai wajar (*fair value*), dan pengungkapan (Martani, dkk., 2012).

Implementasi adopsi IFRS secara keseluruhan (*full convergence*) di Indonesia berlaku efektif dan wajib bagi perusahaan yang telah *go public* dimulai sejak 1 Januari 2012. Perubahan utama dalam bidang akuntansi di Indonesia sebagai dampak implementasi IFRS adalah penggunaan *fair value* atau nilai wajar. Penggunaan *fair value* sebagai pengganti nilai historis diperkirakan akan menghasilkan laporan keuangan yang lebih relevan, tepat waktu, dapat dipercaya,

dan transparan. Berdasarkan penekanan pada penggunaan *fair value*, dan persyaratan pengungkapan yang lebih luas pada standar yang baru, dapat diduga bahwa pengadopsian standar yang baru akan memberikan pengaruh yang baik pada kualitas laba yang dilaporkan pada perusahaan-perusahaan di Indonesia.

Sejumlah penelitian terdahulu menyebutkan bahwa pengimplementasian IFRS dapat mempengaruhi kualitas laba yang dilaporkan dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan perusahaan. Ismail, dkk. (2013) menyatakan bahwa adopsi IFRS akan menghasilkan kualitas laba yang lebih tinggi. Kualitas laba yang lebih tinggi ini ditunjukkan dengan penurunan tingkat manajemen laba dan peningkatan relevansi nilai laba. Bao dan Bao (2004) dalam Ismail, dkk. (2013) menyatakan bahwa jika kualitas laba meningkat, maka hubungan antara nilai perusahaan dan laba yang dilaporkan akan meningkat. Sebaliknya, jika kualitas laba menurun, maka hubungan antara nilai perusahaan dan laba yang dilaporkan pasti akan menurun.

Bellovary, dkk. (2005) menggambarkan kualitas laba sebagai kemampuan laba dalam merefleksikan kebenaran laba perusahaan dan membantu memprediksi laba mendatang, dengan mempertimbangkan stabilitas dan persistensi laba. Kualitas laba merupakan sesuatu yang sentral dan penting dalam dunia akuntansi (Surifah, 2010). Investor, kreditor, dan para pemangku kepentingan lainnya mengambil keputusan salah satunya berdasar pada laporan keuangan. Oleh karena itu, berbagai upaya dilakukan agar dapat menyusun laporan keuangan dengan kualitas laba yang tinggi.

Kecenderungan untuk menghasilkan kualitas laba yang tinggi memicu manajemen untuk memilih kebijakan dan menerapkan metode akuntansi yang dapat memberikan informasi laba yang lebih baik dan disesuaikan dengan tujuan mereka. Manajer cenderung menggunakan pertimbangan (*judgment*) dalam pelaporan keuangan untuk memanipulasi besaran (*magnitude*) laba kepada beberapa *stakeholders* tentang kinerja ekonomi perusahaan dan mempengaruhi hasil kontrak yang bergantung pada informasi akuntansi yang dilaporkan (Healy dan Wahlen, 1999). Pertimbangan yang dilakukan manajer dapat memicu terjadinya manipulasi data dengan cara perataan laba (*income smoothing*) yang merupakan salah satu bentuk dari indikasi terjadinya manajemen laba.

Manajemen laba merupakan tindakan manajemen untuk memilih kebijakan akuntansi dari suatu standar tertentu dengan tujuan untuk memaksimalkan kesejahteraan atau nilai perusahaan. Menurut Sulistyanto (2008), manajemen laba dilakukan dengan mempermainkan komponen-komponen akrual dalam laporan keuangan, sebab pada komponen akrual dapat dilakukan permainan angka melalui metode akuntansi yang digunakan sesuai dengan keinginan orang yang melakukan pencatatan dan penyusunan laporan keuangan. Prinsip akuntansi akrual akan menimbulkan penerapan kebijakan-kebijakan akuntansi. Manajemen laba merupakan pemilihan kebijakan akuntansi untuk mencapai tujuan khusus. Manajemen laba dapat menimbulkan moral hazard, karena manajemen laba dianggap sebagai ancaman moral bagi pengguna laporan keuangan.

Tindakan *earnings management* telah muncul dalam beberapa kasus skandal pelaporan akuntansi yang secara luas diketahui, antara lain Enron, Merck,

WorldCom dan mayoritas perusahaan lain di Amerika Serikat (Cornett, dkk. 2006). Dari beberapa kasus tersebut, maka sangat relevan bila ditarik suatu pertanyaan tentang bagaimana efektivitas peran *corporate governance* (tata kelola perusahaan) dalam memonitoring manajer sebagai pengelola perusahaan.

Tata kelola perusahaan dapat diartikan sebagai seperangkat sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan. Hal ini disebabkan karena tata kelola perusahaan dapat mendorong terbentuknya pola kerja manajemen yang bersih, transparan dan profesional (Effendi, 2009). Tindak manajemen laba yang dilakukan oleh manajer dapat diminimalisir oleh adanya suatu mekanisme *corporate governance*. Beberapa penelitian terdahulu telah mendokumentasikan bahwa mekanisme *corporate governance* berpengaruh terhadap manajemen laba (Wild, 1996; Dechow et al., 1996; Klein, 2002). Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa keandalan dan kualitas laba akuntansi akan meningkat ketika perilaku oportunistik manajer dalam melakukan manajemen laba dipantau oleh mekanisme *corporate governance*. Selain itu, *corporate governance* juga memberikan suatu mekanisme yang memfasilitasi penentuan sasaran-sasaran dari suatu perusahaan, dan sebagai sarana untuk menentukan teknik monitoring kinerja (Deni, dkk., 2004).

Sistem *corporate governance* dibagi menjadi dua bagian yaitu mekanisme *internal governance* seperti proporsi dewan komisaris independen, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kualitas audit, kompensasi eksekutif dan mekanisme *eksternal governance* seperti pengendalian oleh pasar dan level *debt financing* (Barnhart dan Rosentein, 1998 dalam Herawaty, 2008). Terdapat

beberapa mekanisme *corporate governance* sebagai sarana monitoring untuk menyelaraskan perbedaan kepentingan di antara *principal* dan *agent* (*agency conflict*) di dalam penelitian ini, antara lain dengan:

1. Meningkatkan proporsi dewan komisaris independen.

Penelitian Klein (2002) menemukan bahwa dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan atau *outside director* dapat mempengaruhi tindakan manajemen laba. Semakin banyak jumlah komisaris independen maka tindakan pengawasan semakin meningkat sehingga dapat mengurangi tindakan manajemen laba.

2. Meningkatkan jumlah rapat dewan komisaris.

Penelitian Xie, dkk. (2003) menemukan bahwa semakin sering dewan komisaris bertemu atau mengadakan rapat, maka akrual kelolaan perusahaan semakin kecil. Hal ini berarti semakin sering dewan komisaris mengadakan rapat, maka fungsi terhadap manajemen semakin efektif, sehingga dimungkinkan mengurangi praktik tindak manajemen laba.

3. Meningkatkan jumlah ukuran dewan komisaris.

Menurut Klein (2002a) dalam (Ahmed dan Duellman, 2007) ukuran dewan komisaris berhubungan dengan adanya komite audit yang menjalankan tugasnya secara lebih spesifik. Ukuran dewan komisaris yang lebih besar akan menyebabkan tugas setiap anggota dewan komisaris menjadi lebih khusus karena terdapat komite-komite yang lebih khusus dalam mengawasi perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar ukuran dewan komisaris maka memungkinkan penurunan tindak manajemen laba.

4. Meningkatkan proporsi komite audit yang independen.

Xie, dkk. (2003) menyatakan bahwa independensi komite audit berhubungan negatif dengan *discretionary accrual*. Sehingga semakin tinggi independensi komite audit dimungkinkan akan mengurangi tindak manajemen laba.

5. Meningkatkan proporsi komite audit yang memiliki keahlian akuntansi dan keuangan.

Anggota komite audit yang memiliki pengalaman dan latar belakang akuntansi dan keuangan cenderung lebih memahami praktik terjadinya manajemen laba, sehingga merupakan pihak yang efektif untuk mengurangi praktik manajemen laba (Xie, dkk., 2003).

6. Meningkatkan jumlah rapat komite audit.

Komite audit yang semakin aktif memiliki kesempatan yang lebih besar dalam memantau tindakan manajemen. Pernyataan ini didukung oleh Xie dkk., (2003) yang menyatakan bahwa komite audit yang lebih aktif memiliki komposisi yang lebih besar untuk secara efektif memantau akrual diskresioner jangka pendek.

7. Meningkatkan kualitas auditor.

Becker dkk (dalam Herawaty, 2008) menyatakan bahwa klien dari auditor non Big 4 cenderung lebih tinggi dalam melakukan *earnings management*. Kualitas audit yang dilihat dari peran auditor yang memiliki kompetensi yang memadai dan bersikap independen menjadi pihak yang dapat

memberikan kepastian terhadap integritas angka-angka akuntansi yang dilaporkan oleh manajemen.

8. Memperbesar kepemilikan saham oleh institusional.

Midiastuty dan Mahfoedz (2003) menyatakan bahwa investor institusional dianggap sebagai *sophisticated investor* dengan jumlah kepemilikan yang cukup signifikan sehingga dapat memonitor manajemen perusahaan yang pada akhirnya akan mengurangi motivasi manajer untuk melakukan manajemen laba.

Melalui adopsi IFRS menjadi standar lokal yang berlaku di suatu negara, laporan keuangan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang sama, sehingga mempermudah proses konsolidasi pelaporan keuangan perusahaan multinasional dengan anak cabang perusahaan pada negara yang berbeda. Walaupun telah banyak negara yang menerapkan IFRS sebagai standar akuntansi nasionalnya, namun masih sedikit penelitian yang membahas pengaruh penerapan IFRS terhadap manajemen laba yang dilakukan pada negara berkembang. Hal ini menjadi *gap* yang signifikan karena negara maju berbeda dengan negara berkembang.

Negara maju dan negara berkembang, menurut Hofstede dan Hofstede (2004) secara substansial berbeda, dilihat dari aspek kelembagaan, organisasi, maupun aspek ekonomi dan masyarakat. Negara berkembang memiliki pasar yang lebih lemah dan modal yang kurang matang (Gibson, 2003), penegakan peraturan yang terbatas (Berghe, 2002), dan kepemilikan modal yang lebih terkonsentrasi (Shleifer dan Vishny, 1997), sehingga diargumentasikan mengarah kepada asimetri informasi yang lebih besar (Ismail, dkk., 2013). Selain itu, perbedaan akuntansi

antara negara sedang berkembang dengan negara maju membuat investor lebih sulit dalam menilai kinerja perusahaan dan membuat keputusan investasi secara rasional (Rashid dan Islam, 2008). Dengan demikian, dampak dari penerapan IFRS di negara berkembang dengan disertai komponen pengendalian dari tata kelola perusahaan (*corporate governance*) yang telah ada dapat menjadi lebih signifikan daripada yang ditemukan di pasar negara maju.

Penelitian ini dimotivasi oleh penelitian Ismail, dkk. (2013) pada sejumlah perusahaan di Malaysia. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa kualitas laba yang lebih tinggi ini ditunjukkan dengan penurunan tingkat manajemen laba dan peningkatan relevansi nilai laba. Penelitian ini juga menambahkan peran *corporate governance* sebagai variabel pemoderasi untuk melihat pengaruh *corporate governance* apakah memperkuat atau melemahkan pengimplementasian standar akuntansi berbasis *International Financial Reporting Standards* (IFRS) terhadap manajemen laba.

Variabel pemoderasi yang digunakan berdasarkan jurnal acuan Xie, dkk. (2013) yang meneliti peran anggota dewan dan komite audit dalam mencegah manajemen laba. Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa persentase dewan komisaris dari luar perusahaan yang independen berpengaruh negatif secara signifikan terhadap *discretionary accrual*. Komite audit yang berasal dari luar juga mampu melindungi kepentingan pemegang saham dari tindakan manajemen laba yang dilakukan oleh pihak manajemen. Pengaruh terhadap akrual kelolaan ditunjukkan oleh makin seringnya komite audit bertemu dan pengaruh tersebut ditunjukkan dengan koefisien negatif yang signifikan.

1.2 Rumusan Masalah

Manajemen laba merupakan tindakan manajemen untuk memilih kebijakan akuntansi dari suatu standar tertentu dengan tujuan untuk memaksimalkan kesejahteraan atau nilai perusahaan. Motivasi manajemen dalam melakukan manajemen laba dapat menimbulkan penyimpangan yang dapat merugikan nilai perusahaan dan investor (Watt dan Zimmerman, 1986).

Tata kelola perusahaan dapat diartikan sebagai seperangkat sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan. Hal ini disebabkan karena tata kelola perusahaan dapat mendorong terbentuknya pola kerja manajemen yang bersih, transparan dan profesional (Effendi, 2009).

Penerapan standar akuntansi berbasis IFRS yang menekankan pada pendekatan nilai wajar dan pengungkapan laporan keuangan yang lebih informatif akan meningkatkan kualitas laporan keuangan suatu perusahaan. Peningkatan kualitas laporan keuangan perusahaan ditunjukkan dengan peningkatan kualitas laba yang dilaporkan. Untuk meneliti kualitas laba yang dilaporkan tersebut, penelitian ini akan menitikberatkan pada aspek manajemen laba yang dipengaruhi oleh beberapa karakteristik *corporate governance* sebagai variabel pemoderasi.

Berdasarkan hal-hal yang telah dijelaskan di atas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah konvergensi IFRS berpengaruh terhadap manajemen laba?
2. Apakah proporsi dewan komisaris independen mempengaruhi konvergensi IFRS terhadap manajemen laba?

3. Apakah jumlah rapat dewan komisaris mempengaruhi konvergensi IFRS terhadap manajemen laba?
4. Apakah ukuran dewan komisaris mempengaruhi konvergensi IFRS terhadap manajemen laba?
5. Apakah proporsi komite audit yang independen mempengaruhi konvergensi IFRS terhadap manajemen laba?
6. Apakah proporsi komite audit yang memiliki keahlian akuntansi dan keuangan mempengaruhi konvergensi IFRS terhadap manajemen laba?
7. Apakah jumlah rapat komite audit mempengaruhi konvergensi IFRS terhadap manajemen laba?
8. Apakah kualitas auditor mempengaruhi konvergensi IFRS terhadap manajemen laba?
9. Apakah kepemilikan saham institusional mempengaruhi konvergensi IFRS terhadap manajemen laba?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Sesuai rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menguji apakah konvergensi IFRS berpengaruh terhadap manajemen laba.
2. Menguji apakah proporsi dewan komisaris independen mempengaruhi konvergensi IFRS terhadap manajemen laba.
3. Menguji apakah jumlah rapat dewan komisaris mempengaruhi konvergensi IFRS terhadap manajemen laba.

4. Menguji apakah ukuran dewan komisaris mempengaruhi konvergensi IFRS terhadap manajemen laba.
5. Menguji apakah proporsi komite audit yang independen mempengaruhi konvergensi IFRS terhadap manajemen laba.
6. Menguji apakah proporsi komite audit yang memiliki keahlian akuntansi dan keuangan mempengaruhi konvergensi IFRS terhadap manajemen laba.
7. Menguji apakah jumlah rapat komite audit mempengaruhi konvergensi IFRS terhadap manajemen laba.
8. Menguji apakah kualitas auditor mempengaruhi konvergensi IFRS terhadap manajemen laba.
9. Menguji apakah kepemilikan saham institusional mempengaruhi konvergensi IFRS terhadap manajemen laba.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pembaca maupun bagi penyusun khususnya. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Praktis

Bagi para pembuat standar dan regulator, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran dan masukan mengenai dampak implementasi IFRS. Sehingga dapat digunakan sebagai evaluasi dan peningkatan kualitas informasi akuntansi melalui peraturan-peraturan baru mengacu pada IFRS.

Bagi investor, penelitian diharapkan dapat mengevaluasi nilai laba yang dapat digunakan untuk keputusan investasi khususnya di pasar modal.

Bagi manajemen perusahaan, penelitian dapat dijadikan arahan akan pentingnya melakukan pelaporan keuangan secara relevan dengan penggunaan standar pelaporan IFRS dan memahami peranan praktek *corporate governance* terhadap praktek *earnings management* yang dilakukan perusahaan dalam upaya meningkatkan nilai perusahaan.

2. Manfaat Teoritis

Sebagai referensi dan bahan pertimbangan bagi peneliti-peneliti selanjutnya, khususnya bagi penelitian mengenai implementasi IFRS dan dampaknya terhadap tingkat manajemen laba yang dipengaruhi oleh variabel *corporate governance*.

1.4 Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini akan disajikan dalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah yang menampilkan landasan pemikiran secara garis besar baik dalam teori maupun fakta yang ada, yang menjadi alasan dibuatnya penelitian ini. Perumusan masalah berisi mengenai pernyataan tentang keadaan, fenomena, dan/atau konsep yang memerlukan jawaban melalui

penelitian. Tujuan dan kegunaan penelitian yang merupakan hal yang diharapkan dapat dicapai mengacu pada latar belakang masalah, perumusan masalah, dan hipotesis yang diajukan. Pada bagian terakhir dari bab ini yaitu sistem penulisan, diuraikan mengenai ringkasan materi yang akan dibahas pada setiap bab yang ada dalam skripsi.

BAB II : TELAAH PUSTAKA

Bab ini menguraikan landasan teori yang berisi jabaran teori-teori dan menjadi dasar dalam perumusan hipotesis serta membantu dalam analisis hasil penelitian. Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya yang berhubungan dengan penelitian ini. Kerangka pemikiran adalah skema yang dibuat untuk menjelaskan secara singkat permasalahan yang akan diteliti. Hipotesis adalah pernyataan yang disimpulkan dari tinjauan pustaka, serta merupakan jawaban sementara atas masalah penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan menguraikan variabel penelitian dan definisi operasional dimana deskripsi terhadap variabel yang digunakan dalam penelitian akan dibahas sekaligus melakukan pendefinisian secara operasional. Jenis dan sumber data adalah gambaran tentang data yang digunakan untuk variabel penelitian. Penentuan yang berkaitan dengan jumlah populasi dan jumlah sampel yang diambil. Kemudian metode pengumpulan data yang digunakan. Dan metode analisis mengungkapkan bagaimana gambaran model analisis yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV : HASIL DAN ANALISIS

Bagian ini dijelaskan tentang deskripsi objek penelitian yang berisi penjelasan singkat objek yang digunakan dalam penelitian. Analisis data yang menitik beratkan pada hasil olahan data sesuai alat dan teknik yang digunakan. Dan intepretasi hasil yang menguraikan intepretasi terhadap hasil analisis sesuai dengan teknik analisis yang digunakan, termasuk di dalamnya pemberian argumentasi atau dasar pbenarannya.

BAB V : PENUTUP

Merupakan bab terakhir dari skripsi ini yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran dari pembahasan. Saran yang diajukan berkaitan dengan penelitian dan merupakan anjuran yang diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam penelitian.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu

2.1.1 IFRS

International Financial Reporting Standard (IFRS) merupakan standar, interpretasi dan kerangka kerja dalam rangka penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang disusun oleh IASC (*International Accounting Standards Committee*), organisasi pendahulu dari IASB (*International Accounting Standards Board*). Sebelumnya IFRS ini lebih dikenal dengan nama *International Accounting Standards (IAS)*. IASC dibentuk pada tahun 1973 dengan menerbitkan IAS pertama kali pada tahun 1975. Proses penyusunan IAS mengalami perubahan substansial dengan direstrukturisasinya IASC menjadi IASB pada tahun 2001. Tujuan dibentuknya IASC dan IASB adalah untuk menyusun standar pelaporan keuangan internasional yang berkualitas tinggi (Cahyonowati dan Ratmono, 2012). Hal ini sejalan dengan mandat pertemuan negara-negara G-20 di London pada 2 April 2009 untuk mempunyai *a single set of high-quality global accounting standards* dalam rangka menyediakan informasi keuangan yang berkualitas di pasar modal internasional. Untuk mencapai tujuan tersebut, IASB telah menerbitkan *principles-based standards* yang disebut sebagai IFRS.

Menurut Martani, dkk. (2012), IFRS memiliki tiga ciri utama, diantaranya *principles-based*, nilai wajar (*fair value*), dan pengungkapan.

1. *Principles-based*

Standar yang menggunakan *principles-based* hanya mengatur hal-hal yang pokok dalam standar sedangkan prosedur dan kebijakan detail diserahkan kepada pemakai (Martani dkk., 2012). Standar mengatur prinsip pengakuan sesuai substansi ekonomi, tidak didasarkan pada ketentuan detail dalam atribut kontrak perjanjian. Standar berbasis prinsip memungkinkan manajer, anggota komite audit, dan auditor menerapkan *judgment* profesionalnya untuk lebih fokus pada merefleksi kejadian atau transaksi ekonomi secara substansial, tidak sekedar melaporkan transaksi atau kejadian ekonomi sesuai dengan standar.

2. Konsep penggunaan nilai wajar (*fair value*)

Nilai wajar (*fair value*) adalah suatu jumlah yang dapat digunakan sebagai dasar pertukaran aset atau penyelesaian kewajiban antara pihak yang paham (*knowledgeable*) dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar (*arm's length transaction*) (IAI, 2009). Keuntungan digunakan nilai wajar adalah bahwa pos-pos aset dan liabilitas yang dimiliki lebih mencerminkan nilai yang sebenarnya pada saat tanggal laporan keuangan. Konsep penggunaan nilai wajar meningkatkan relevansi informasi akuntansi untuk pengambilan keputusan. Informasi nilai wajar dianggap lebih relevan karena menunjukkan nilai terkini.

3. Pengungkapan (*disclosure*)

IFRS mensyaratkan pengungkapan berbagai informasi tentang risiko baik kualitatif maupun kuantitatif. Pengungkapan dalam laporan keuangan harus

sejalan dengan data / informasi yang dipakai untuk pengambilan keputusan yang diambil oleh manajemen. Pengungkapan harus disajikan lebih banyak dan lebih rinci dalam laporan keuangan. Pengungkapan diperlukan agar pengguna laporan keuangan dapat mempertimbangkan informasi yang relevan dan perlu diketahui terkait dengan apa yang dicantumkan dalam laporan keuangan dan kejadian penting yang terkait. Pengungkapan dapat berupa kebijakan akuntansi, rincian detail, penjelasan penting, dan komitmen (Martani, dkk., 2012).

2.1.1.1 Konvergensi IFRS di Indonesia

Lembaga profesi akuntansi IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) menetapkan bahwa Indonesia melakukan konvergensi penuh (*full convergence*) IFRS pada 1 Januari 2012. Dalam proses melakukan konvergensi IFRS, terdapat dua macam strategi adopsi, yaitu *big bang strategy* dan *gradual strategy*. *Big bang strategy* mengadopsi penuh IFRS sekaligus, tanpa melalui tahapan-tahapan tertentu. Strategi ini digunakan oleh negara -negara maju. Sedangkan pada *gradual strategy*, adopsi IFRS dilakukan secara bertahap. Strategi ini digunakan oleh negara – negara berkembang seperti halnya yang dilakukan Indonesia. Terdapat tiga tahapan dalam melakukan konvergensi IFRS di Indonesia, yaitu:

1. Tahap Adopsi (2008 – 2011), meliputi aktivitas dimana seluruh IFRS diadopsi ke PSAK, persiapan infrastruktur yang diperlukan, dan evaluasi terhadap PSAK yang berlaku.

2. Tahap Persiapan Akhir (2011), dalam tahap ini dilakukan penyelesaian terhadap persiapan infrastruktur yang diperlukan. Selanjutnya, dilakukan penerapan secara bertahap beberapa PSAK berbasis IFRS.
3. Tahap Implementasi (2012), berhubungan dengan aktivitas penerapan PSAK IFRS secara bertahap. Kemudian dilakukan evaluasi terhadap dampak penerapan PSAK secara komprehensif.

Indonesia yang telah mengadopsi standar akuntansi berbasis IFRS pada tanggal 1 Januari 2012 lalu tidaklah terlepas dari rintangan dalam proses menuju harmonisasi PSAK ke dalam IFRS. Menurut Nobes dan Parker (2002) dalam Gamayuni (2009), rintangan yang paling fundamental dalam proses harmonisasi adalah: (1) Perbedaan praktek akuntansi yang berlaku saat ini pada berbagai negara, (2) Kurangnya atau lemahnya tenaga profesional atau lembaga profesional di bidang akuntansi pada beberapa negara, (3) Perbedaan sistem politik dan ekonomi pada tiap-tiap negara. Sedangkan menurut Lecturer Ph. Diaconu Paul (2002) dalam Gamayuni (2009), hambatan dalam menuju harmonisasi adalah: (1) Nasionalisme tiap-tiap negara, (2) Perbedaan sistem pemerintahan pada tiap-tiap negara, (3) Perbedaan kepentingan antara perusahaan multinasional dengan perusahaan nasional yang sangat mempengaruhi proses harmonisasi antar negara, (4) Tingginya biaya untuk merubah prinsip akuntansi.

Adopsi seutuhnya (*full adoption*) terhadap IFRS, berarti merubah prinsip-prinsip akuntansi yang selama ini telah dipakai menjadi suatu standar akuntansi berlaku secara internasional. Terlepas dari segala kendala yang menghadang, DSAK-IAI (Dewan Standar Akuntansi Keuangan – Ikatan Akuntan Indonesia)

semakin mengukuhkan niatnya untuk mengadopsi IFRS karena memang IFRS memiliki banyak kelebihan (Juan dan Wahyuni, 2012), antara lain:

- IFRS dihasilkan oleh lembaga internasional yang independen sehingga pengaruh kekuatan politik dalam penyusunan standar dapat minimal.
- Proses pembuatan IFRS lebih komprehensif melalui riset yang mendalam. Komentar untuk *discussion paper* maupun *exposure draft* keluaran IASB datang dari seluruh dunia sehingga standar yang dihasilkan lebih mencerminkan kebutuhan global daripada kebutuhan suatu negara tertentu.
- IFRS adalah standar yang berbasis prinsip (*principle-based*) sehingga pengaturannya lebih sederhana dibandingkan dengan standar pelaporan keuangan keluaran Amerika Serikat yang lebih terperinci dan rumit (*rule based*).
- IFRS mensyaratkan pengungkapan informasi (*disclosure*) yang lebih detail dan terperinci sehingga membantu pengguna laporan keuangan mendapatkan informasi yang relevan.
- IFRS semakin diterima oleh banyak negara, terlebih setelah terbukti standar akuntansi Amerika Serikat tidak mampu membentangi skandal-skandal perusahaan besar seperti kasus Enron dan Worldcom.

2.1.1.2 Dampak Implementasi IFRS

Implementasi IFRS dapat memberikan dampak positif dan negatif dalam dunia bisnis dalam dunia bisnis di Indonesia. Berikut ini adalah berbagai dampak dalam penerapan IFRS (Handayani, 2011):

1. Akses ke pendanaan internasional akan lebih terbuka karena laporan keuangan akan lebih mudah dikomunikasikan ke investor global.
2. Relevansi laporan keuangan akan meningkat karena lebih banyak menggunakan nilai wajar.
3. Kinerja keuangan (laporan laba rugi) akan lebih fluktuatif apabila harga-harga fluktuatif.
4. *Smoothing income* menjadi semakin sulit dengan penggunaan *balance sheet approach* dan *fair value*.
5. *Principle-based standards* mungkin menyebabkan keterbandingan laporan keuangan sedikit menurun yakni bila penggunaan *professional judgment* ditumpangi dengan kepentingan untuk mengatur laba (*earning management*).
6. Penggunaan *off balance sheet* semakin terbatas.

Dari beberapa poin dampak implementasi penggunaan IFRS tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi IFRS dapat meningkatkan daya informasi dari pelaporan keuangan perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Adopsi standar internasional ini juga sangat penting dalam rangka stabilitas perekonomian. IFRS diharapkan akan mengurangi hambatan-hambatan investasi, meningkatkan transparansi perusahaan, mengurangi biaya yang terkait dengan penyusunan laporan keuangan, dan mengurangi *cost of capital*.

2.1.2 Agency Theory

Teori keagenan merupakan dasar yang digunakan untuk memahami praktik bisnis perusahaan. Menurut Jensen dan Meckling (1976), hubungan keagenan

merupakan sebuah kontrak antara *agent* dengan *principal*. Prinsip utama dari teori agensi adalah menjelaskan adanya hubungan kerja antara satu pihak yang disebut agen yaitu manajemen perusahaan dan pihak lain yang disebut prinsipal yaitu pemegang saham yang berkepentingan atas kepemilikannya terhadap perusahaan.

Menurut Ujiyantho dan Pramuka (2007) timbulnya manajemen laba dapat dijelaskan dengan teori agensi. Sebagai agen, manajer secara moral bertanggung jawab untuk mengoptimalkan keuntungan para pemilik (*principal*) dan sebagai imbalannya akan memperoleh kompensasi sesuai dengan kontrak. Jika kedua belah pihak memiliki tujuan yang sama yaitu untuk memaksimalkan nilai perusahaan, maka agen akan bertindak dengan cara yang sesuai dengan kepentingan prinsipal.

Teori ini dilandasi oleh beberapa asumsi (Eisenhardt, 1989). Asumsi-asumsi tersebut dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu asumsi tentang sifat manusia (*people*), asumsi keorganisasian (*organizations*), dan asumsi informasi (*information*). Asumsi sifat manusia menekankan bahwa manusia memiliki sifat mementingkan diri sendiri (*self-interest*), manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi mendatang (*bounded rationality*), dan manusia selalu menghindari resiko (*risk averse*). Asumsi keorganisasian menekankan terhadap konflik antar anggota organisasi, efisiensi sebagai kriteria efektivitas dan adanya asimetri informasi antara *principal* dan *agent*. Asumsi informasi adalah bahwa informasi sebagai barang komoditi yang dapat diperjualbelikan. Berdasarkan asumsi sifat dasar manusia dijelaskan bahwa masing-masing individu semata-mata termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri, sehingga dimungkinkan terjadinya konflik kepentingan antara *principal* dan *agent*.

Pengelola perusahaan yakni manajer lebih banyak mengetahui kondisi internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan pemilik (pemegang saham). Ketidakseimbangan penguasaan informasi akan memicu munculnya suatu kondisi yang disebut sebagai asimetri informasi. Asimetri antara manajemen (*agent*) dengan pemilik (*principal*) dapat memberikan kesempatan kepada manajer untuk melakukan manajemen laba dalam rangka menyesatkan pemilik (pemegang saham) mengenai kinerja ekonomi perusahaan (Ujiyantho dan Pramuka, 2007).

Corporate governance yang merupakan konsep yang didasarkan pada teori keagenan, diharapkan bisa berfungsi sebagai alat untuk memberikan keyakinan kepada para investor bahwa mereka akan menerima *return* atas dana yang telah mereka investasikan. *Corporate governance* berkaitan dengan bagaimana para investor yakin bahwa manajer akan memberikan keuntungan bagi mereka, yakin bahwa manajer tidak akan mencuri atau menginvestasikan ke dalam proyek-proyek yang tidak menguntungkan berkaitan dengan dana yang telah ditanamkan oleh investor, dan berkaitan dengan bagaimana para investor mengontrol para manajer (Shleifer dan Vishny, 1997). Dengan kata lain *corporate governance* diharapkan dapat berfungsi untuk menekan atau menurunkan biaya keagenan (*agency cost*).

2.1.3 Manajemen Laba

Menurut Copeland (1968), manajemen laba mencakup usaha manajemen untuk memaksimalkan, atau meminimumkan laba, termasuk perataan laba sesuai dengan keinginan manajemen. Sedangkan menurut Healy dan Wahlen (1999),

manajemen laba terjadi ketika manajer menggunakan pertimbangan (*judgment*) dalam pelaporan keuangan dan penyusutan transaksi untuk mengubah laporan keuangan dengan tujuan untuk memanipulasi besaran (*magnitude*) laba kepada beberapa *stakeholders* tentang kinerja ekonomi perusahaan atau untuk mempengaruhi hasil perjanjian (kontrak) yang tergantung pada angka-angka akuntansi yang dilaporkan. Healy dan Wahlen juga menyatakan bahwa definisi manajemen laba mengandung beberapa aspek. Pertama, intervensi manajemen laba terhadap pelaporan keuangan dapat dilakukan dengan penggunaan *judgment*, misalnya *judgment* yang dibutuhkan dalam mengestimasi sejumlah peristiwa ekonomi di masa depan untuk ditunjukkan dalam laporan keuangan, seperti perkiraan umur ekonomis dan nilai residu aktiva tetap, tanggung jawab untuk pensiun, pajak yang ditangguhkan, kerugian piutang piutang dan penurunan nilai aset. Disamping itu manajer mempunyai pilihan untuk metode akuntansi, seperti metode garis lurus atau *accelerated depreciation methods* atau LIFO, FIFO, atau metode penilaian persediaan rata-rata tertimbang. Kedua, tujuan manajemen laba untuk menyesatkan *stakeholders* mengenai kinerja ekonomi perusahaan. Hal ini muncul ketika manajemen memiliki akses terhadap informasi yang tidak dapat diakses oleh pihak luar.

Healy dan Wahlen (1999) membagi motivasi manajemen laba ke dalam tiga kelompok, diantaranya:

1. Motivasi Pasar Modal (*Capital Market Motivation*)

Dalam motivasi pasar modal dijelaskan bahwa investor dalam menilai harga saham dipengaruhi oleh angka-angka akuntansi, dalam hal ini adalah laba. Laba

dipandang sebagai salah satu sumber informasi penting yang akan mempengaruhi keputusan investor dalam berinvestasi. Dengan demikian, tidak mengherankan jika terdapat sebagian manajer yang berusaha membuat laporan keuangannya tampil baik dengan maksud untuk mempengaruhi kinerja saham dalam jangka pendek. Manajemen cenderung melaporkan laba bersih rendah (*understate*) ketika melakukan *buy out* dan melaporkan laba lebih tinggi (*overstate*) ketika melakukan penawaran saham ke publik.

2. Motivasi Kontrak (*Contracting Motivation*)

Motivasi kontrak menerangkan bahwa data-data akuntansi digunakan untuk memonitor dan meregulasi kontrak antara perusahaan dan pihak-pihak lain yang berkepentingan (*stakeholders*). Baik secara eksplisit maupun implisit, kontrak-kontrak yang berjenis kompensasi manajemen banyak digunakan untuk menyelaraskan insentif manajemen dan pemangku kepentingan eksternal. Terdapat alasan khusus yang menyebabkan mengapa manajemen laba terjadi dalam konteks kontrak yaitu baik kreditor maupun komite kompensasi yang bertugas menyiapkan berkas kontrak antara manajer perusahaan, merasa bahwa upaya mengungkapkan ada tidaknya manajemen laba adalah upaya yang mahal dan membutuhkan waktu. Kondisi ini seakan menjadi pendorong bagi manajer untuk melakukan praktik manajemen laba.

3. Motivasi Peraturan (*Regulation Motivation*)

Melalui motivasi peraturan, perhatian terhadap manajemen laba menjadi penting bagi para pembuat standar karena manajemen laba apapun alasannya dapat mengarah kepada penyajian laporan keuangan yang tidak benar, dan

akhirnya dapat mempengaruhi alokasi sumber daya yang ada. Manajer dapat memanipulasi laba dengan berbagai cara, baik yang secara langsung berpengaruh terhadap keputusan operasi, pembiayaan, investasi maupun bentuk (pemilihan prosedur akuntansi yang diperbolehkan dalam Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU).

Dalam *Positive Accounting Theory* terdapat tiga faktor pendorong yang melatarbelakangi terjadinya manajemen laba (Watts dan Zimmerman, 1986) yaitu:

1. *Bonus Plan Hypothesis*

Manajemen akan lebih memilih metode akuntansi yang memaksimalkan tingkat utilitasnya yaitu bonus yang tinggi. Manajer yang memberikan bonus besar berdasarkan laba akan lebih banyak yang menggunakan metode akuntansi yang meningkatkan laba yang dilaporkan.

2. *Debt / Equity Hypothesis*

Hipotesis utang / ekuitas memprediksi semakin tinggi rasio hutang atau ekuitas perusahaan, semakin besar kemungkinan bagi manajer memilih metode akuntansi yang dapat meningkatkan laba. Semakin tinggi rasio hutang atau ekuitas semakin ketat perusahaan dengan batas perjanjian atau peraturan kredit. Semakin tinggi batasan kredit semakin besar kemungkinan penyimpangan perjanjian kredit dan pengeluaran biaya. Manajer akan memiliki metode akuntansi yang dapat menaikkan laba sehingga dapat mengendurkan batas kredit dan mengurangi biaya kesalahan teknis.

3. *Political Cost Hypothesis*

Perusahaan besar cenderung menggunakan metode akuntansi yang dapat mengurangi laba periodik dibandingkan dengan perusahaan kecil. Ukuran perusahaan merupakan ukuran variable proksi dan aspek politik. Asumsi yang mendasari hipotesis ini adalah mahal nya nilai informasi bagi individu untuk menentukan apakah laba akuntansi betul-betul menunjukkan monopoli laba. Selain itu mahal nya individu untuk melaksanakan kontrak dengan pihak lain dalam proses politik dalam rangka menegakkan aturan hukum dan regulasi yang dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Dengan demikian, individu yang rasional cenderung memiliki untuk tidak mengetahui informasi yang lengkap. Proses politik tidak berbeda jauh dengan proses pasar. Atas dasar *cost information* dan *cost monitoring* tersebut, manajer memiliki insentif untuk memiliki laba akuntansi tertentu dalam proses politik tersebut.

Praktik manajemen laba yang dilakukan oleh manajemen perusahaan maupun prinsipal dapat dilakukan oleh beberapa cara. Menurut Scott (2000), manajemen laba dapat dilakukan dengan cara-cara berikut ini:

1. *Taking a bath*

Pola ini terjadi pada saat reorganisasi termasuk pengangkatan CEO baru dengan melaporkan kerugian dalam jumlah besar. Tindakan ini diharapkan dapat meningkatkan laba di masa datang.

2. *Income Minimizations*

Dilakukan pada saat perusahaan mengalami tingkat profitabilitas yang tinggi sehingga jika laba periode mendatang diperkirakan turun cukup signifikan dapat diatasi dengan mengambil laba periode sebelumnya.

3. *Income Maximization*

Praktik manajemen laba ini dilakukan pada saat suatu laba perusahaan sedang menurun. Tindakan atas *income maximization* bertujuan untuk melaporkan *net income* yang tinggi untuk bonus yang lebih besar. Pola ini dilakukan oleh perusahaan yang melakukan pelanggaran perjanjian hutang.

4. *Income Smoothing*

Perusahaan melakukan perataan laba yang dilaporkan sehingga dapat mengurangi fluktuasi laba yang terlalu besar karena pada umumnya investor lebih menyukai laba yang relatif stabil.

2.1.4 Corporate Governance

Corporate governance merupakan suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang diharapkan dapat memberikan dan meningkatkan nilai perusahaan kepada para pemegang saham (Shleifer dan Vishny, 1997). Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) mendefinisikan *corporate governance* sebagai suatu perangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditor, pemerintah, karyawan serta pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya sehubungan dengan hak-hak dan

kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan.

Good corporate governance dipandang sebagai upaya pengendalian yang dilakukan perusahaan untuk meningkatkan kinerja manajemen dengan melakukan pengendalian yang lebih diarahkan pada pengawasan perilaku manajer, sehingga tindakan yang dilakukan oleh manajer dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan. Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) menyusun suatu pedoman yang dijadikan acuan dalam penerapan *corporate governance*. Dalam pedoman tersebut KNKG memaparkan prinsip-prinsip *corporate governance* sebagai berikut (KNKG, 2006):

1. *Transparansi (Transparency)*

Yaitu mengelola perusahaan secara transparan dengan semua *stakeholder* (orang-orang yang terlibat langsung maupun tidak langsung dengan aktivitas perusahaan). Di sini para pengelola perusahaan harus berbuat secara transparan kepada penanam saham, jujur apa adanya dalam membuat laporan usaha, tidak manipulatif. Keterbukaan informasi dalam proses pengambilan keputusan dan pengungkapan informasi yang dianggap penting dan relevan.

2. *Akuntabilitas (Accountability)*

Yaitu kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban dalam perusahaan, sehingga pengelolaan perusahaan dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Manajemen harus membuat *job description* yang jelas kepada semua karyawan dan menegaskan fungsi-fungsi dasar setiap bagian. Dari sini

perusahaan akan menjadi jelas hak dan kewajibannya, fungsi dan tanggung jawabnya serta kewenangannya dalam setiap kebijakan perusahaan.

3. *Responsibilitas (Responsibility)*

Yaitu menyadari bahwa ada bagian-bagian perusahaan yang membawa dampak pada lingkungan dan masyarakat pada umumnya. Di sini perusahaan harus memperhatikan amdal, keamanan lingkungan, dan kesesuaian diri dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat setempat. Perusahaan harus apresiatif dan proaktif terhadap setiap gejolak sosial masyarakat dan setiap yang berkembang di masyarakat.

4. *Independensi (Independency)*

Yaitu berjalan tegak dengan bergandengan bersama masyarakat. Perusahaan harus memiliki otonominya secara penuh sehingga pengambilan-pengambilan keputusan dilakukan dengan pertimbangan otoritas yang ada secara penuh. Perusahaan harus berjalan dengan menguntungkan supaya bisa memelihara keberlangsungan bisnisnya, namun demikian bukan keuntungan yang tanpa melihat orang lain yang juga harus untung. Semuanya harus untung dan tidak ada satu pun yang dirugikan.

5. *Kewajaran dan Kesetaraan (Fairness)*

Yaitu semacam kesetaraan atau perlakuan yang adil di dalam memenuhi hak dan kewajibannya terhadap stake holder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perusahaan harus membuat sistem yang solid untuk membuat pekerjaan semuanya seperti yang diharapkan. Dengan pekerjaan yang fair tersebut diharapkan semua peraturan

yang ada ditaati guna melindungi semua orang yang punya kepentingan terhadap keberlangsungan bisnis kita.

Berbagai penelitian terkait *corporate governance* menghasilkan berbagai mekanisme yang meyakinkan *stakeholder* bahwa tindakan manajemen laba selaras dengan kepentingan mereka. Mekanisme *corporate governance* dibagi menjadi dua bagian yaitu mekanisme *internal governance* seperti proporsi dewan komisaris independen, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kualitas audit, kompensasi eksekutif dan mekanisme *eksternal governance* seperti pengendalian oleh pasar dan level *debt financing* (Barnhart dan Rosentein, 1998 dalam Herawaty, 2008).

2.1.4.1 Proporsi Dewan Komisaris Independen

Dewan komisaris merupakan bagian organ perusahaan yang memiliki tanggung jawab dan kewenangan penuh atas pengelolaan perusahaan. Sementara komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak berasal dari pihak terafiliasi. Yang dimaksud dengan terafiliasi adalah pihak yang mempunyai hubungan bisnis dan kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali, anggota direksi dan dewan komisaris lain, serta dengan perusahaan itu sendiri (Komite Nasional Kebijakan Governance, 2006). Jumlah komisaris independen harus dapat menjamin agar mekanisme pengawasan berjalan secara efektif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Salah satu dari komisaris independen harus mempunyai latar belakang akuntansi atau keuangan.

Keberadaan komisaris independen telah diatur Bursa Efek Jakarta (BEJ) melalui peraturan BEJ No.Kep-305/BEJ/07-2004. Peraturan tersebut menyiratkan bahwa perusahaan yang terdaftar di Bursa harus mempunyai komisaris independen yang secara proporsional sama dengan jumlah saham yang dimiliki pemegang saham yang minoritas. Dalam peraturan ini, persyaratan jumlah minimal komisaris independen adalah 30% dari seluruh anggota dewan komisaris. Wallace dan Peter dalam Ujiyantho dan Pramuka (2007) menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki proporsi anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan, atau *outside director* dapat mempengaruhi tindak manajemen laba, sehingga akan meningkatkan pengawasan dan akan mengurangi tindakan manajer dalam melakukan manajemen laba.

Menurut Peraturan BEJ No.Kep-305/BEJ/07-2004, persyaratan menjadi komisaris independen pada Perusahaan Tercatat adalah sebagai berikut:

- a. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan pemegang saham pengendali perusahaan tercatat yang bersangkutan;
- b. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan direktur dan/atau komisaris lainnya perusahaan tercatat yang bersangkutan;
- c. Tidak bekerja rangkap sebagai direktur di perusahaan lainnya yang terafiliasi dengan perusahaan tercatat yang bersangkutan;
- d. Memahami peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

2.1.4.2 Jumlah Rapat Dewan Komisaris

Dalam Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia yang dikeluarkan oleh KNKG tahun 2006 mengungkapkan bahwa setiap perusahaan harus membuat pernyataan tentang kesesuaian penerapan GCG dengan Pedoman GCG ini dalam laporan tahunannya. Pernyataan tersebut harus disertai laporan tentang struktur dan mekanisme kerja organ perusahaan serta informasi penting lain yang berkaitan dengan penerapan GCG. Dengan demikian, pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya, termasuk regulator, dapat menilai sejauh mana Pedoman GCG pada perusahaan tersebut telah diterapkan.

Laporan tentang struktur dan mekanisme kerja organ perusahaan meliputi struktur dan mekanisme kerja dewan komisaris, yang antara lain mencakup:

- a. Nama anggota dewan komisaris dengan menyebutkan statusnya yaitu komisaris independen atau komisaris bukan independen;
- b. Jumlah rapat yang dilakukan oleh dewan komisaris, serta jumlah kehadiran setiap anggota dewan komisaris dalam rapat;
- c. Mekanisme dan kriteria penilaian sendiri (*self assessment*) tentang kinerja masing-masing para anggota dewan komisaris;
- d. Penjelasan mengenai komite-komite penunjang dewan komisaris yang meliputi:
 - (i) nama anggota dari masing-masing komite; (ii) uraian mengenai fungsi dan mekanisme kerja dari setiap komite; (iii) jumlah rapat yang dilakukan oleh setiap komite serta jumlah kehadiran setiap anggota; dan (iv) mekanisme dan kriteria penilaian kinerja komite.

Menurut Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: Per-01/MBU/2011 pasal 14 disebutkan bahwa rapat dewan komisaris harus diadakan secara berkala, sekurang-kurangnya sekali dalam setiap bulan, dan dalam rapat tersebut dewan komisaris dapat mengundang direksi. Besarnya intensitas pertemuan yang diadakan oleh dewan komisaris diharapkan akan mampu meningkatkan kepatuhan pengungkapan wajib IFRS.

2.1.4.3 Ukuran Dewan Komisaris

Dalam pedoman GCG 2006 disebutkan bahwa dewan komisaris sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggungjawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan, memberikan nasihat kepada direksi, memastikan bahwa perusahaan melaksanakan GCG. Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007, pada pasal 108 ayat (5) menjelaskan bahwa bagi perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas, wajib memiliki paling sedikitnya 2 (dua) anggota dewan komisaris. Oleh karena itu, jumlah anggota dewan komisaris dalam tiap perusahaan berbeda-beda jumlahnya karena harus disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektivitas dalam pengambilan keputusan. Agar pelaksanaan tugas dewan komisaris dapat berjalan secara efektif, perlu dipenuhi prinsip-prinsip berikut:

1. Komposisi dewan komisaris harus memungkinkan pengambilan keputusan secara efektif, tepat dan cepat, serta dapat bertindak independen.
2. Anggota dewan komisaris harus profesional, yaitu berintegritas dan memiliki kemampuan sehingga dapat menjalankan fungsinya dengan baik termasuk

memastikan bahwa Direksi telah memperhatikan kepentingan semua pemangku kepentingan.

3. Fungsi pengawasan dan pemberian nasihat dewan komisaris mencakup tindakan pencegahan, perbaikan, sampai kepada pemberhentian sementara.

2.1.4.4 Proporsi Komite Audit Independen

Menurut Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor: Kep-643/BL/2012 dalam peraturan nomor IX.1.5, komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris. Menurut peraturan tersebut, struktur dan keanggotaan komite audit adalah sebagai berikut:

- a. Komite audit paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari komisaris independen dan pihak dari luar emiten atau perusahaan publik.
- b. Komite audit diketuai oleh komisaris independen.
- c. Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 1. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan emiten atau perusahaan publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;
 2. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada emiten atau perusahaan publik tersebut;

3. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan emiten atau perusahaan publik, anggota dewan komisaris, anggota direksi, atau pemegang saham utama emiten atau perusahaan publik tersebut; dan
4. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha emiten atau perusahaan publik tersebut.

Tugas komite audit membantu dewan komisaris untuk memastikan bahwa:

- (i) laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, (ii) struktur pengendalian internal perusahaan dilaksanakan dengan baik, (iii) pelaksanaan audit internal maupun eksternal dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku, dan (iv) tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen (KNKG, 2006).

2.1.4.5 Proporsi Komite Audit yang Memiliki Keahlian Akuntansi dan Keuangan

Menurut Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor: Kep-643/BL/2012 dalam peraturan nomor IX.1.5 menjelaskan bahwa persyaratan keanggotaan komite audit antara lain:

- a. wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik;
- b. wajib memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha emiten atau perusahaan publik, proses

audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya;

- c. wajib mematuhi kode etik komite audit yang ditetapkan oleh emiten atau perusahaan publik;
- d. bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan;
- e. wajib memiliki paling kurang satu anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan/atau keuangan;
- f. bukan merupakan orang dalam kantor akuntan publik, kantor konsultan hukum, kantor jasa penilai publik atau pihak lain yang memberi jasa *assurance*, jasa *non-assurance*, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada emiten atau perusahaan publik yang bersangkutan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;
- g. bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan emiten atau perusahaan publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir kecuali komisaris independen;
- h. tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada emiten atau perusahaan publik;
- i. dalam hal anggota komite audit memperoleh saham emiten atau perusahaan publik baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, maka saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut.

- j. tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota dewan komisaris, anggota direksi, atau pemegang saham utama emiten atau perusahaan publik tersebut;
- k. tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha emiten atau perusahaan publik tersebut.

Dengan demikian diharapkan semakin banyak anggota komite audit yang memiliki latar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan/atau keuangan dapat mengurangi praktik manajemen laba yang terjadi.

2.1.4.6 Jumlah Rapat Komite Audit

Menurut Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor: Kep-643/BL/2012 dalam peraturan nomor IX.1.5 mengenai pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit no. 7 tentang rapat komite audit diantaranya menjelaskan hal-hal sebagai berikut, yaitu:

- a. Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling kurang satu kali dalam 3 (tiga) bulan.
- b. Rapat Komite Audit hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota.
- c. Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- d. Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinions*), yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

Dengan besarnya intensitas pertemuan yang diadakan oleh komite audit diharapkan akan mampu mengurangi terjadinya praktik manajemen laba.

2.1.4.7 Kualitas Auditor

Auditing adalah bentuk monitoring yang digunakan oleh perusahaan untuk menurunkan biaya keagenan (*agency cost*) perusahaan dengan pemegang hutang (*bond holder*) dan pemegang saham (Jensen dan Meckling, 1976). Nilai *auditing* timbul karena *auditing* menurunkan pelaporan yang salah atas informasi akuntansi (Ardiati, 2005). Hasil dari proses *auditing* dicerminkan dalam bentuk penyajian laporan keuangan oleh perusahaan. Hasil audit tidak bisa diamati secara langsung sehingga pengukuran variabel kualitas audit maupun kualitas auditor menjadi sulit untuk dioperasionalkan. Oleh karena itu, para peneliti terdahulu kemudian mencari indikator pengganti dari kualitas auditor.

Defond dan Jimbalvo (1991) dalam Sanjaya (2008) menyatakan bahwa dimensi kualitas auditor yang paling sering digunakan dalam penelitian adalah ukuran kantor akuntan publik atau KAP karena nama baik perusahaan (KAP) dianggap merupakan gambaran yang paling penting. Becker, dkk. (1998) dalam Herawaty (2008) menyatakan bahwa klien dari auditor Non Big 6 melaporkan *discretionary accrual* yang lebih tinggi dari yang dilaporkan oleh klien auditor Big 6. Berarti dapat disimpulkan bahwa klien dari auditor Non Big 6 cenderung lebih tinggi dalam melakukan *earnings management*. Karena pada saat penelitian ini KAP Big 6 telah berubah menjadi Big 4, maka juga diduga bahwa klien dari KAP Non Big 4 cenderung lebih tinggi dalam melakukan *earnings management*

dibandingkan dengan klien dari KAP Big 4. Berikut ini adalah nama-nama KAP yang termasuk dalam jajaran KAP Big 4:

1. Purwantono, Suherman & Surja yang berafiliasi dengan Ernst and Young International.
2. Tanudireja, Wibisana & rekan berafiliasi dengan PriceWaterhouse Coopers.
3. Shidharta dan Widjaja berafiliasi dengan Klynveld Peat Marwick Goeldener (KPMG) International.
4. Osman, Bing, Satrio, dan rekan berafiliasi dengan Delloitte Touche and Tohmatsu.

2.1.4.8 Kepemilikan Saham Institusional

Kepemilikan saham institusional merupakan jumlah saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga. Kepemilikan institusional terdiri atas kepemilikan saham oleh pihak institusi antara lain bank, dana pensiun, perusahaan asuransi, dan lembaga keuangan lainnya (Tarjo, 2008). Menurut Nuraini (2012), kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak manajemen melalui proses monitoring secara efektif sehingga mengurangi tindakan manajemen melakukan manajemen laba. Pernyataan ini sesuai dengan Midiastuty dan Mahfoedz (2003) menyatakan bahwa investor institusional dianggap sebagai *sophisticated investor* dengan jumlah kepemilikan yang cukup signifikan sehingga dapat memonitor manajemen perusahaan yang pada akhirnya akan mengurangi motivasi manajer untuk melakukan manajemen laba.

2.1.5 Pertumbuhan Perusahaan (*Growth*)

Growth atau pertumbuhan perusahaan merupakan kemampuan perusahaan untuk meningkatkan *size* atau ukuran perusahaan. Untuk dapat tumbuh secara konstan dalam jangka waktu yang panjang, perusahaan harus menyediakan modal yang cukup untuk membiayai kegiatan operasional dan non operasional perusahaan dalam rangka keperluan ekspansi. Pertumbuhan perusahaan yang cepat maka akan semakin besar dana yang dibutuhkan untuk ekspansi. Semakin tinggi kebutuhan modal perusahaan di masa datang, maka semakin tinggi pula keinginan perusahaan untuk menahan laba. Tuntutan terhadap kebutuhan modal dan kebutuhan pembiayaan yang besar di masa mendatang, maka dimungkinkan akan mendorong perusahaan untuk melakukan manajemen laba. Pertumbuhan perusahaan dapat diukur dengan menggunakan rasio PBV (*Price Book Value Ratio*), yaitu hasil pembagian antara harga saham sekarang dengan nilai buku bersih per lembar saham (BVPS) pada akhir tahun fiskal (Ismail, dkk., 2013).

2.1.6 Leverage

Salah satu alternatif sumber dana perusahaan selain menjual saham di pasar modal adalah melalui sumber dana eksternal berupa hutang (Jao dan Pagalung, 2011). Perusahaan akan berusaha memenuhi perjanjian hutang agar memperoleh penilaian yang baik dari kreditur. Hal ini kemudian dapat memotivasi manajer melakukan manajemen laba untuk menghindari pelanggaran perjanjian hutang. Penelitian yang dilakukan oleh Dechow, dkk. (1996) menemukan bahwa motivasi perusahaan melakukan manajemen laba adalah untuk memenuhi kebutuhan

pendanaan eksternal dan memenuhi perjanjian hutang. Pernyataan ini juga dibuktikan oleh penelitian Herawati dan Baridwan (2007) yang memberikan bukti empiris tentang adanya tingkat manajemen laba yang lebih besar pada perusahaan yang terikat perjanjian liabilitas daripada perusahaan yang tidak terikat perjanjian liabilitas.

Leverage dapat diukur dengan *Debt to Asset Ratio* (rasio antara total hutang dan total aset) dan *Debt to Equity Ratio* (rasio antara total hutang dan total ekuitas). Penelitian ini menggunakan *Debt to Asset Ratio* untuk mengukur *leverage*. Semakin tinggi rasio *leverage* perusahaan, maka akan semakin tinggi pula nilai liabilitas perusahaan (Ismail, dkk., 2013). Apabila *leverage* digunakan dengan baik, *leverage* dapat digunakan untuk meningkatkan nilai perusahaan, namun apabila digunakan untuk menarik minat kreditur, maka *leverage* akan memunculkan tindakan manajemen laba (Purwanti, 2012).

2.1.7 Ukuran Perusahaan (*Size*)

Ukuran perusahaan merupakan gambaran besar kecilnya perusahaan yang dapat diukur dengan total aset, nilai perusahaan, dan penjualan perusahaan. Perusahaan yang besar lebih diperhatikan oleh masyarakat sehingga mereka akan lebih berhati-hati dalam melakukan pelaporan keuangan dan melaporkan kondisinya lebih akurat (Jao dan Pagalung, 2011). Menurut Purwanti (2012), pengukuran perusahaan dengan menggunakan total aset digunakan sebagai proksi ukuran perusahaan dengan mempertimbangkan bahwa nilai aset relatif lebih stabil dibandingkan dengan nilai pasar dan penjualan.

Perusahaan dengan total aset yang besar merupakan perusahaan yang telah mencapai tahap kedewasaan, dimana dalam tahap ini arus kas perusahaan sudah positif, dianggap memiliki prospek yang baik dalam jangka waktu yang relatif lama, mencerminkan stabilitas perusahaan, dan lebih mampu menghasilkan laba dibanding perusahaan dengan total aset yang kecil. Ukuran perusahaan (*size*) dapat diukur dengan logaritma natural total aktiva perusahaan (Ismail, dkk., 2013). *Size* mempunyai pengaruh negatif yang signifikan terhadap besaran pengelolaan laba (Purwanti, 2012). Dengan demikian dimungkinkan ketika ukuran perusahaan semakin kecil, maka akan semakin tinggi potensi perusahaan untuk melakukan manajemen laba.

2.1.8 Profitabilitas

Profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk mendapatkan laba dalam suatu periode tertentu. Profitabilitas dapat diukur dengan rasio *return on assets* (ROA). ROA merupakan perbandingan antara laba bersih dengan total aktiva yang dimiliki perusahaan (Ismail, dkk., 2013). *Return On Assets* (ROA) menunjukkan efektivitas perusahaan dalam mengelola aset baik dari modal sendiri maupun dari modal pinjaman, investor akan melihat seberapa efektif suatu perusahaan dalam mengelola assets. Semakin tinggi tingkat *Return On Assets* (ROA) maka akan memberikan efek terhadap volume penjualan saham, artinya tinggi rendahnya *Return On Assets* (ROA) akan mempengaruhi minat investor dalam melakukan investasi, sehingga akan mempengaruhi volume penjualan saham perusahaan.

Guna dan Herawaty (2010) melakukan penelitian profitabilitas terhadap manajemen laba, hasilnya profitabilitas berpengaruh terhadap manajemen laba. Ini bisa terjadi karena laba merupakan indikator penting dalam menjalankan usaha. Semakin laba meningkat, semakin tinggi keinginan manajer melakukan manajemen laba untuk mengambil keuntungan secara pribadi.

2.1.9 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai pengaruh adopsi IFRS terhadap manajemen laba telah dilakukan oleh Ismail, dkk. (2013). Penelitian ini menggunakan sekitar 4.010 lebih observasi pada perusahaan di Malaysia selama periode tiga tahun sebelum dan tiga tahun setelah pengadopsian standar akuntansi IFRS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa periode setelah adopsi IFRS mampu menghasilkan manajemen laba yang lebih rendah dan *value relevant* yang lebih tinggi.

Rohaeni dan Aryati (2011) menguji pengaruh konvergensi IFRS terhadap *income smoothing* dengan kualitas audit sebagai variabel moderasi. Penelitian ini menggunakan enam puluh satu perusahaan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia, sembilan puluh perusahaan *listed* pada Singapore Exchange, dan lima puluh perusahaan yang terdaftar pada Shanghai Stock Exchange selama tahun 2006-2009. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa adopsi IFRS memberikan efek negatif terhadap *income smoothing*. Namun, hipotesis kedua interaksi antara variabel IFRS dengan kualitas audit berpengaruh positif terhadap *income smoothing*. Konvergensi IFRS terhadap *income smoothing* perusahaan yang diaudit

KAP big 4 lebih tinggi dibanding perusahaan yang diaudit KAP non big 4. Hal ini bertentangan dengan hipotesis pertama.

Penelitian Jao dan Pagalung (2011) menguji pengaruh *corporate governance*, ukuran perusahaan, dan *leverage* terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur Indonesia. Penelitian ini menggunakan dua puluh delapan sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2006-2009. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *corporate governance* yang terdiri atas kepemilikan manajerial, komposisi dewan komisaris independen, dan komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba, sementara kepemilikan institusional dan ukuran dewan signifikan berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Ukuran perusahaan secara signifikan berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. *Leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba.

Ujiyantho dan Pramuka (2007) meneliti mekanisme *corporate governance*, manajemen laba, dan kinerja keuangan pada pada tiga puluh perusahaan manufaktur yang terdaftar dalam Bursa Efek Jakarta periode 2001-2004. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kepemilikan institusional dan jumlah dewan komisaris tidak berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba. Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba. Proporsi dewan komisaris independen berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen laba. Pengaruh kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, proporsi dewan komisaris independen dan jumlah dewan komisaris secara bersama-sama teruji dengan tingkat pengaruh yang signifikan terhadap manajemen laba. Manajemen laba

(*discretionary accruals*) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan (*cash flow return on assets*).

Xie, dkk. (2003) meneliti peran dewan dan komite audit dalam mencegah manajemen laba. Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa persentase dewan komisaris dari luar perusahaan yang independen berpengaruh negatif secara signifikan terhadap *discretionary accrual*. Komite audit yang berasal dari luar juga mampu melindungi kepentingan pemegang saham dari tindakan manajemen laba yang dilakukan oleh pihak manajemen. Pengaruh terhadap akrual kelolaan ditunjukkan oleh makin seringnya komite audit bertemu dan pengaruh tersebut ditunjukkan dengan koefisien negatif yang signifikan.

Beberapa penelitian telah dilakukan untuk menguji dampak penerapan IFRS terhadap tindakan manajemen laba (*earning management*), sedangkan penelitian penggunaan variabel pemoderasi *good governance* dalam interaksi antara penerapan IFRS dengan manajemen laba belum banyak dilakukan.

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

Peneliti	Variabel	Hasil Penelitian
Ismail, dkk. (2013)	Adopsi IFRS Manajemen Laba <i>Value Relevant</i>	Penerapan IFRS akan menghasilkan kualitas yang lebih tinggi dari laba yang dilaporkan. Kualitas yang lebih tinggi dari laba yang dilaporkan dikaitkan dengan penurunan manajemen laba dan kenaikan relevansi nilai laba melalui <i>price-earnings model</i> dan <i>return-earnings model</i> .
Rohaeni dan Aryati (2011)	Konvergensi IFRS <i>Income Smoothing</i> Kualitas Audit	Adopsi IFRS memberikan efek negatif terhadap <i>income smoothing</i> . Namun, hipotesis kedua yakni interaksi antara variabel IFRS dengan kualitas audit berpengaruh positif terhadap <i>income smoothing</i> .
Jao dan Pagalung (2011)	Corporate Governance Ukuran Perusahaan <i>Leverage</i> Manajemen Laba	<i>Corporate governance</i> yang terdiri atas kepemilikan manajerial, komposisi dewan komisaris independen, dan komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba, sementara kepemilikan institusional dan ukuran dewan signifikan berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Ukuran perusahaan secara signifikan berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. <i>Leverage</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba.

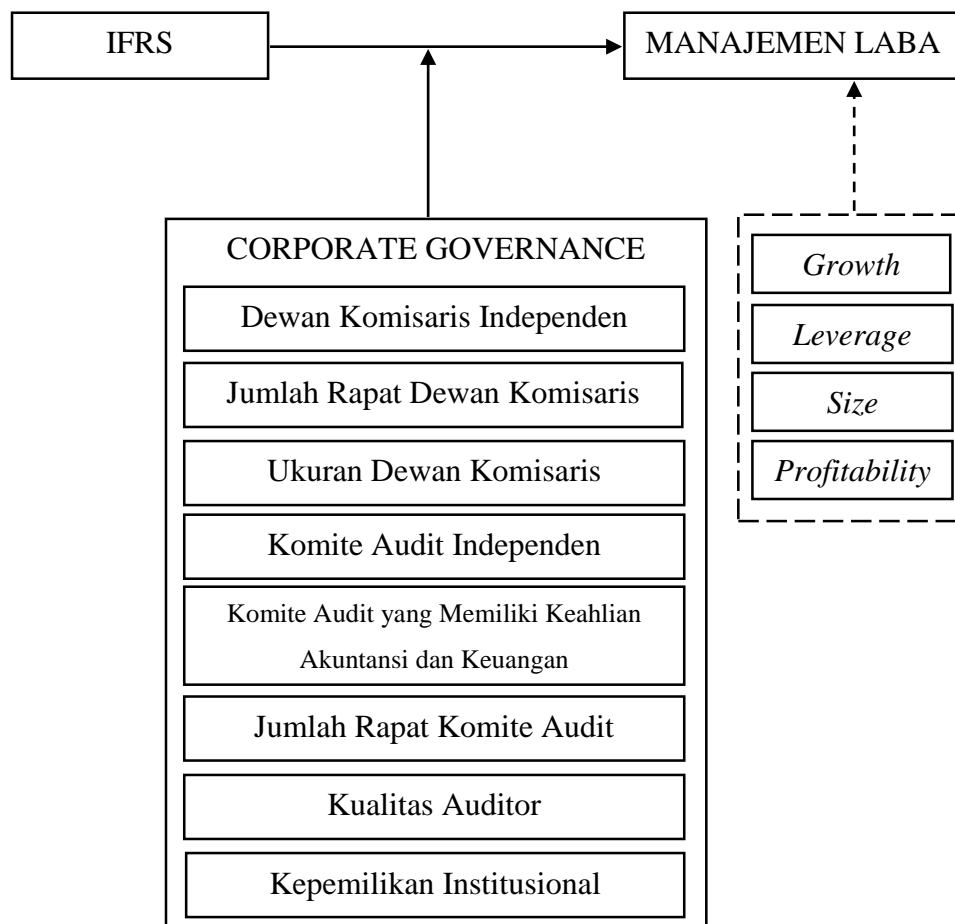
Lanjutan Tabel 2.1

Ujiyantho dan Pramuka (2007)	Kepemilikan Institusional Kepemilikan Manajerial Proporsi Dewan Komisaris Independen Jumlah Dewan Komisaris Manajemen Laba Kinerja Keuangan	Kepemilikan institusional dan jumlah dewan komisaris tidak berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba. Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba. Proporsi dewan komisaris independen berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen laba. Manajemen laba (<i>discretionary accruals</i>) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan (<i>cash flow return on assets</i>)
Xie, dkk. (2003)	Proporsi Dewan Komisaris Independen Dewan Komisaris yang Memiliki Latar Belakang Keuangan Frekuensi Pertemuan Dewan Independensi Komite Audit Komite Audit yang Memiliki Latar Belakang Keuangan Frekuensi Pertemuan Komite Audit Manajemen Laba	Persentase dewan komisaris independen, dewan komisaris yang memiliki latar belakang keuangan, rapat dewan komisaris, independensi komite audit, anggota komite audit yang ahli di bidang keuangan, berpengaruh negatif secara signifikan terhadap <i>discretionary accrual</i> . Komite audit yang lebih aktif memiliki komposisi yang lebih besar untuk secara efektif memantau akrual diskresioner jangka pendek.

2.2 Rerangka Pemikiran

Gambar 2.1

Rerangka Pemikiran



2.3 Hipotesis

2.3.1 Pengaruh Konvergensi IFRS Terhadap Manajemen Laba

IFRS (*International Financial Reporting Standards*) yang menekankan pada *principle-based* menuntut pihak manajemen untuk memberikan estimasi dan *judgement* yang logis atau laporan keuangan. IFRS juga menuntut adanya pengungkapan (*disclosure*) yang lebih lengkap atas laporan keuangan dengan

menggunakan pendekatan *fair value* baik informasi akuntansi yang sifatnya kualitatif maupun kuantitatif. Sejumlah tuntutan dari IFRS tersebut membuat manajemen kesulitan untuk berperilaku oportunistik dalam melakukan praktik manajemen laba. Penelitian yang dilakukan oleh Ismail, dkk. (2013) menganalisis pengaruh penerapan standar akuntansi berbasis IFRS terhadap kualitas laba perusahaan. Penelitian tersebut menunjukkan adanya penurunan manajemen laba setelah perusahaan menerapkan standar akuntansi berbasis IFRS. Dengan demikian dalam penelitian ini, akan diuji kembali hubungan antara konvergensi IFRS dan manajemen laba pada beberapa perusahaan di Indonesia, dengan hipotesis sebagai berikut:

H1: Konvergensi IFRS Berpengaruh Negatif terhadap Manajemen laba.

2.3.2 Pengaruh Konvergensi IFRS Terhadap Manajemen Laba dengan Proporsi Dewan Komisaris Independen Sebagai Variabel Moderasi

KNKG (2006) menjelaskan bahwa komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak mempunyai hubungan bisnis dan kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali, anggota direksi dan dewan komisaris lain, serta dengan perusahaan itu sendiri. Komisaris independen harus dapat menjamin agar mekanisme pengawasan berjalan secara efektif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sementara IFRS menekankan pada *principle-based* yang menuntut pihak manajemen untuk memberikan estimasi dan *judgement* yang logis atau laporan keuangan, serta menuntut adanya pengungkapan (*disclosure*) yang lebih lengkap atas laporan keuangan dengan menggunakan pendekatan *fair value*

pada informasi akuntansi. Sejumlah tuntutan dari IFRS tersebut membuat manajemen kesulitan untuk berperilaku oportunistik dalam melakukan praktik manajemen laba. Oleh karena itu, dengan diadopsinya IFRS, keberadaan dewan komisaris independen dimungkinkan akan memberikan pengaruh terhadap pengendalian dan pengawasan aktivitas pengelola perusahaan termasuk perilaku oportunistik seperti manajemen laba. Hal tersebut didukung oleh Penelitian Klein (2002) yang menemukan bahwa dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan atau *outside director* dapat mempengaruhi tindakan manajemen laba. Semakin banyak jumlah komisaris independen maka tindakan pengawasan semakin meningkat sehingga dapat mengurangi tindakan manajemen laba. Dari uraian di atas hipotesis yang diajukan adalah:

H2: Proporsi Dewan Komisaris Independen Memoderasi Pengaruh Konvergensi IFRS terhadap Manajemen Laba.

2.3.3 Pengaruh Konvergensi IFRS Terhadap Manajemen Laba dengan Jumlah Rapat Dewan Komisaris Sebagai Variabel Moderasi

Menurut Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: Per-01/MBU/2011 disebutkan bahwa rapat dewan komisaris harus diadakan secara berkala, sekurang-kurangnya sekali dalam setiap bulan, dan dalam rapat tersebut dewan komisaris dapat mengundang direksi. Penelitian Xie, dkk. (2003) menyatakan bahwa semakin sering dewan komisaris bertemu atau mengadakan rapat, maka akrual kelolaan perusahaan semakin kecil. Hal ini berarti semakin sering dewan komisaris mengadakan rapat, maka fungsi terhadap manajemen

semakin efektif, sehingga dimungkinkan mengurangi praktik tindak manajemen laba. Dengan demikian, dengan diadopsi nya IFRS sebagai standar akuntansi yang menuntut adanya transparansi di segala bidang, maka dimungkinkan jumlah rapat dewan komisaris dapat mempengaruhi konvergensi IFRS terhadap manajemen laba. Dari uraian tersebut, dapat diajukan hipotesis:

H3: Jumlah Rapat Dewan Komisaris Memoderasi Pengaruh Konvergensi IFRS terhadap Manajemen Laba.

2.3.4 Pengaruh Konvergensi IFRS Terhadap Manajemen Laba dengan Ukuran Dewan Komisaris Sebagai Variabel Moderasi

Dalam pedoman GCG 2006 juga disebutkan bahwa jumlah anggota dewan komisaris harus disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektivitas dalam pengambilan keputusan. Menurut Klein (2002a) dalam (Ahmed dan Duellman, 2007) ukuran dewan komisaris berhubungan dengan adanya komite audit yang menjalankan tugasnya secara lebih spesifik. Ukuran dewan komisaris yang lebih besar akan menyebabkan tugas setiap anggota dewan komisaris menjadi lebih khusus karena terdapat komite-komite yang lebih khusus dalam mengawasi perusahaan, sehingga lebih efektif dalam monitoring praktik manajemen laba. Dengan demikian, dengan diadopsi nya IFRS sebagai standar akuntansi yang menuntut adanya transparansi di segala bidang, maka dimungkinkan ukuran dewan komisaris dapat mempengaruhi konvergensi IFRS terhadap manajemen laba. Dari uraian di atas hipotesis yang diajukan adalah:

H4: Ukuran Dewan Komisaris Memoderasi Pengaruh Konvergensi IFRS terhadap Manajemen Laba.

2.3.5 Pengaruh Konvergensi IFRS Terhadap Manajemen Laba dengan Proporsi Komite Audit Independen Sebagai Variabel Moderasi

Tugas komite audit membantu dewan komisaris untuk memastikan bahwa:

(i) laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, (ii) struktur pengendalian internal perusahaan dilaksanakan dengan baik, (iii) pelaksanaan audit internal maupun eksternal dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku, dan (iv) tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen (KNKG, 2006). Menurut hasil penelitian Xie, dkk. (2003) menyatakan bahwa independensi komite audit berhubungan negatif dengan *discretionary accrual*. Oleh karena itu, dengan diterapkannya standar akuntansi berbasis IFRS, dimana standar yang mengedepankan transparansi dalam segala bidang, proporsi independensi komite audit yang semakin tinggi dapat mengurangi tindak manajemen laba. Dengan demikian, hipotesis yang dapat diajukan adalah:

H5: Proporsi Komite Audit Independen Memoderasi Pengaruh Konvergensi IFRS terhadap Manajemen Laba.

2.3.6 Pengaruh Konvergensi IFRS Terhadap Manajemen Laba dengan Proporsi Komite Audit yang Memiliki Keahlian Akuntansi dan Keuangan Sebagai Variabel Moderasi

Menurut Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor: Kep-643/BL/2012 dalam peraturan nomor IX.1.5 menjelaskan bahwa persyaratan keanggotaan komite audit wajib memiliki paling kurang satu anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan/atau keuangan. Penelitian Xie, dkk. (2003) menyatakan bahwa anggota komite audit yang merupakan komisaris independen yang ahli di bidang keuangan merupakan pihak yang efektif untuk mengurangi manajemen laba. Dengan demikian diharapkan, dengan diadopsinya IFRS, semakin banyak anggota komite audit yang memiliki latar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan/atau keuangan dapat mengurangi praktik manajemen laba yang terjadi. Dari uraian tersebut, dapat diajukan hipotesis:

H6: Proporsi Komite Audit yang Memiliki Keahlian Akuntansi dan Keuangan Memoderasi Pengaruh Konvergensi IFRS terhadap Manajemen Laba.

2.3.7 Pengaruh Konvergensi IFRS Terhadap Manajemen Laba dengan Jumlah Rapat Komite Audit Sebagai Variabel Moderasi

Menurut Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor: Kep-643/BL/2012 dalam peraturan nomor IX.1.5 mengenai pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit no. 7 tentang rapat komite audit menyatakan bahwa komite audit mengadakan rapat secara berkala paling kurang satu kali dalam 3 (tiga)

bulan. Rapat komite audit hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota. Menurut penelitian Xie dkk., (2003) menyatakan bahwa komite audit yang lebih aktif memiliki komposisi yang lebih besar untuk secara efektif memantau akrual diskrisioner jangka pendek. Sehingga dimungkinkan komite audit yang semakin aktif akan memiliki kesempatan yang lebih besar dalam memantau tindakan manajemen. Dengan demikian, dengan diadopsinya IFRS sebagai standar akuntansi yang menuntut adanya transparansi di segala bidang, maka dimungkinkan jumlah rapat komite audit dapat mempengaruhi konvergensi IFRS terhadap praktik manajemen laba yang semakin kecil. Dari uraian tersebut, dapat diajukan hipotesis:

H7: Jumlah Rapat Komite Audit Memoderasi Pengaruh Konvergensi IFRS terhadap Manajemen Laba.

2.3.8 Pengaruh Konvergensi IFRS Terhadap Manajemen Laba dengan Kualitas Auditor Sebagai Variabel Moderasi

Becker, dkk. (1998) dalam Herawaty (2008), menyatakan bahwa klien dari auditor Non Big 6 melaporkan *discretionary accrual* yang lebih tinggi dari yang dilaporkan oleh klien auditor Big 6. Berarti dapat disimpulkan bahwa klien dari auditor Non Big 6 cenderung lebih tinggi dalam melakukan *earnings management*. Karena pada saat penelitian ini KAP Big 6 telah berubah menjadi Big 4, maka juga diduga bahwa klien dari KAP Non Big 4 cenderung lebih tinggi dalam melakukan *earnings management* dibandingkan dengan klien dari KAP Big 4. Kualitas audit yang dilihat dari peran auditor yang memiliki kompetensi yang memadai dan

bersikap independen menjadi pihak yang dapat memberikan kepastian terhadap integritas angka-angka akuntansi yang dilaporkan oleh manajemen. Dengan demikian, IFRS yang menuntut adanya transparansi dalam segala bidang diduga dapat mengurangi terjadinya praktik manajemen laba dengan diperkuat oleh kualitas auditor yang tinggi. Dari uraian tersebut, dapat diajukan hipotesis:

H8: Kualitas Auditor Memoderasi Pengaruh Konvergensi IFRS terhadap Manajemen Laba.

2.3.9 Pengaruh Konvergensi IFRS Terhadap Manajemen Laba dengan Kepemilikan Saham Institusional Sebagai Variabel Moderasi

Kepemilikan saham institusional merupakan jumlah saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga. Madiastuty dan Mahfoedz (2003) menyatakan bahwa investor institusional dianggap sebagai *sophisticated investor* dengan jumlah kepemilikan yang cukup signifikan sehingga dapat memonitor manajemen perusahaan yang pada akhirnya akan mengurangi motivasi manajer untuk melakukan manajemen laba. Sementara IFRS yang menekankan pada *principle-based (judgement yang logis)*, *disclosure* serta dengan menggunakan pendekatan *fair value*, dapat diduga akan mengurangi tindak manajemen laba dengan diperkuat oleh kepemilikan saham institusional yang semakin besar. Dari uraian tersebut, dapat diajukan hipotesis:

H9: Kepemilikan Saham Institusional Memoderasi Pengaruh Konvergensi IFRS terhadap Manajemen Laba.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

Penelitian yang akan dilakukan menggunakan tiga variabel yaitu variabel terikat (*dependen*), variabel bebas (*independen*), dan variabel moderating. Variabel terikat merupakan variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel bebas. Variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini adalah manajemen laba (*earning management*) yang diukur dengan perhitungan nilai (*discretionary accrual*). Variabel bebas merupakan variabel yang diduga mempengaruhi variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah konvergensi IFRS. Variabel moderating merupakan variabel yang memperkuat dan memperlemah hubungan satu variabel dengan variabel lain. Variabel moderating yang digunakan dalam penelitian ini adalah mekanisme *corporate governance* dengan delapan karakteristik. Delapan karakteristik tersebut adalah proporsi dewan komisaris independen, jumlah rapat dewan komisaris, ukuran dewan komisaris, proporsi komite audit independen, proporsi komite audit yang memiliki keahlian akuntansi dan keuangan, jumlah rapat komite audit, kualitas auditor, dan kepemilikan saham institusional.

3.1.1 Variabel Dependen (Manajemen Laba)

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah manajemen laba. Manajemen laba merupakan suatu tindakan negatif yang diambil oleh manajemen perusahaan dengan cara memanipulasi laba dengan tujuan menguntungkan pihak diri perusahaan sendiri. Dalam penelitian ini, manajemen laba diukur dengan menggunakan hubungan antara total akrual dan arus kas operasi. Penelitian ini mengadopsi model *Modified Jones*. Model *Modified Jones* mengukur hubungan antara total akrual dan arus kas. Menurut Dechow, Sloan & Sweeny (1995) Model *Modified Jones* dianggap model yang paling baik untuk mengukur manajemen laba. *Discretionary accruals* digunakan sebagai proksi untuk mengukur manajemen laba. Dalam mengukur manajemen laba menggunakan model *Modified Jones* dapat dilakukan langkah-langkah berikut untuk mencari nilai *discretionary accrual* :

1. Perhitungan total akrual dengan menggunakan pendekatan arus kas (*cash flow approach*) :

$$TACC_{it} = NI_{it} - OCF_{it}$$

Keterangan :

$TACC_{it}$ = Total akrual perusahaan i pada tahun ke t

NI_{it} = Laba bersih setelah pajak perusahaan i pada tahun ke t

OCF_{it} = Arus kas operasi perusahaan i pada tahun ke t

2. Mencari nilai koefisien dari regresi total akrual

Regresi ini digunakan untuk mendeteksi adanya *discretionary accruals* dan *non discretionary accruals*. *Discretionary accrual* digunakan untuk melihat perbedaan antara total akrual dan *nondiscretionary accrual*.

$$\text{TACC}_{it} / \text{TA}_{it-1} = \alpha_1 (1 / \text{TA}_{it-1}) + \beta_1 (\Delta \text{REV}_{it} - \Delta \text{REC}_{it} / \text{TA}_{it-1}) + \beta_2 (\text{PPE}_{it} / \text{TA}_{it-1}) + \varepsilon_{it}$$

Keterangan :

TACC_{it} = Total akrual perusahaan pada tahun t

TA_{it-1} = Total aset perusahaan pada akhir tahun t-1

ΔREV_{it} = Perubahan total pendapatan pada tahun t

ΔREC_{it} = Perubahan total piutang bersih pada tahun t

PPE_{it} = *Property, plant, and Equipment* perusahaan pada tahun t

ε_{it} = *Error item*

Dalam model pengestimasi akrual diskresioner kemudian diskala dengan aset total tahun sebelumnya (*lagged assets*) untuk mengurangi masalah heteroskedastisitas. Skala ini merupakan suatu pendekatan *Weighted Least Squares (WLS)* yaitu untuk mengestimasi sebuah persamaan regresi yang memiliki *disturbance term* yang heteroskedastik. Pendekatan WLS mensyaratkan untuk semua variabel, baik dependen maupun independen dibagi dengan estimate variansi *disturbance term*. Menurut (Jones, 1991), *lagged assets* diasumsikan positif terkait dengan variansi dari *disturbance term*. Maka dari itu, *lagged assets* digunakan sebagai penskala.

3. Perhitungan *discretionary accrual*

Ordinary Least Square (OLS) digunakan untuk memperoleh estimasi a_1 , b_1 , dan b_2 dari masing masing α_1 , β_1 , dan β_2 . Model ini diasumsikan hubungan antara akrual nondiskresioner dan variabel penjelas. Sehingga untuk menghitung *discretionary accruals* dengan menggunakan persamaan sebagai berikut :

$$DAC = (TACC / TA_{it-1}) - (a_1 (1 / TA_{it-1}) + b_1 ((\Delta REV_{it} - \Delta REC_{it}) / TA_{it-1}) + b_2 (PPE_{it} / TA_{it-1}))$$

Keterangan :

$DAC = Discretionary\ accruals$

3.1.2 Variabel Independen (Konvergensi IFRS)

Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah adopsi IFRS_{i,t}. IFRS_{i,t} diprosikan dengan variabel *dummy*, dengan indeks sebagai berikut:

0 = Periode sebelum konvergensi penuh (*full convergence*) IFRS sebagai basis standar akuntansi keuangan di Indonesia, yakni sebelum tanggal 1 Januari 2012. Periode sampel yang digunakan adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar pada BEI tahun 2010-2011.

1 = Periode setelah konvergensi penuh (*full convergence*) IFRS sebagai basis standar akuntansi keuangan di Indonesia, yakni setelah tanggal 1 Januari 2012. Periode sampel yang digunakan adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar pada BEI tahun 2012-2013.

Sebelum tahun 2010, perusahaan manufaktur yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) belum menerapkan Standar Akuntansi Keuangan berbasis IFRS. Kemudian pada tahun 2010-2011, beberapa perusahaan manufaktur telah menerapkan SAK berbasis IFRS secara bertahap seiring dengan diberlakukannya beberapa SAK yang telah mengadopsi IFRS, seperti PSAK 14 tentang persediaan (adopsi IAS 2), PSAK 50 tentang instrumen keuangan: penyajian (adopsi IAS 32), PSAK 55 tentang instrumen keuangan: pengakuan dan pengukuran (adopsi IAS 39), dan ISAK 8 tentang penentuan apakah suatu perjanjian mengandung suatu sewa (adopsi IFRIC 4). Selanjutnya pada tahun 2012 dan 2013, seluruh perusahaan manufaktur sudah menerapkan SAK berbasis IFRS seiring dengan sudah diberlakukannya seluruh SAK berbasis IFRS secara nasional.

3.1.3 Variabel Moderating

3.1.3.1 Proporsi Dewan Komisaris Independen

Komisaris Independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak mempunyai hubungan bisnis dan kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali, anggota Direksi dan Dewan Komisaris lain, serta dengan perusahaan itu sendiri. Komisaris Independen harus dapat menjamin agar mekanisme pengawasan berjalan secara efektif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan KNKG (2006). Proporsi Dewan Komisaris Independen dihitung dengan membagi jumlah Dewan Komisaris Independen dengan total jumlah Dewan Komisaris yang ada dalam perusahaan.

<p>Proporsi Dewan Komisaris Independen (%)</p> $= \frac{\text{Jumlah Anggota Komisaris Independen}}{\text{Jumlah Seluruh Anggota Dewan Komisaris}} \times 100\%$
--

3.1.3.2 Jumlah Rapat Dewan Komisaris

Jumlah rapat Dewan Komisaris adalah jumlah pertemuan atau rapat yang dilakukan oleh Dewan Komisaris dalam waktu satu tahun. Jumlah rapat Dewan Komisaris diukur dengan menghitung jumlah rapat yang dilakukan oleh Dewan Komisaris pada laporan tahunan perusahaan.

3.1.3.3 Ukuran Dewan Komisaris

Ukuran Dewan Komisaris merupakan jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris dalam suatu perusahaan. Ukuran Dewan Komisaris diukur dengan menghitung jumlah anggota Dewan Komisaris dalam suatu perusahaan yang terdapat dalam laporan tahunan perusahaan.

3.1.3.4 Proporsi Komite Audit Independen

Variabel Komite Audit diukur dengan menggunakan jumlah anggota Komite Audit Independen yang ada di suatu perusahaan. Independensi Komite Audit pada penelitian ini merupakan keadaan dimana para anggota dari komite audit harus diakui sebagai pihak independen. Anggota Komite Audit harus bebas dari setiap kewajiban kepada perusahaan tercatat. Selain itu, para anggota juga tidak memiliki suatu kepentingan tertentu terhadap perusahaan tercatat atau direksi atau komisaris perusahaan tercatat serta harus bebas dari keadaan yang dapat

menyebabkan pihak lain meragukan sikap independensinya. Pengukuran variabel ini menggunakan persentase (%) antara anggota Komite Audit yang independen terhadap jumlah seluruh anggota Komite Audit.

$$\begin{aligned} & \text{Proporsi Komite Audit Independen (\%)} \\ & = \frac{\text{Jumlah Anggota Komite Audit Independen}}{\text{Jumlah Seluruh Anggota Komite Audit}} \times 100\% \end{aligned}$$

3.1.3.5 Proporsi Komite Audit yang Memiliki Keahlian Akuntansi dan Keuangan

Variabel ini diukur dengan cara menghitung persentase (%) dari jumlah anggota Komite Audit yang merupakan ahli keuangan terhadap jumlah anggota Komite Audit keseluruhan.

$$\begin{aligned} & \text{Proporsi Komite Audit yang Memiliki Keahlian Akuntansi dan Keuangan(\%)} \\ & = \frac{\text{Jumlah Anggota Komite Audit yang Memiliki Keahlian Akuntansi dan Keuangan}}{\text{Jumlah Seluruh Anggota Komite Audit}} \times 100\% \end{aligned}$$

3.1.3.6 Jumlah Rapat Komite Audit

Jumlah rapat Komite Audit adalah jumlah pertemuan atau rapat yang dilakukan oleh Komite Audit dalam waktu satu tahun. Jumlah rapat Komite Audit diukur dengan menghitung jumlah rapat yang dilakukan oleh Komite Audit pada laporan tahunan perusahaan.

3.1.3.7 Kualitas Auditor

Ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) digunakan untuk mengukur kualitas auditor pada penelitian ini. Auditor yang berkualitas akan mampu mengurangi faktor ketidakpastian yang berkaitan dengan laporan keuangan yang disajikan oleh pihak manajemen. Untuk mengukur kualitas auditor digunakan ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan *variabel dummy* yaitu, menggunakan nilai 1 untuk perusahaan yang diaudit oleh KAP Big 4 dan nilai 0 untuk perusahaan yang diaudit oleh KAP Non Big 4. Berikut ini adalah nama-nama KAP yang termasuk dalam jajaran KAP Big 4:

1. Purwantono, Suherman & Surja yang berafiliasi dengan Ernst and Young International.
2. Tanudireja, Wibisana & rekan berafiliasi dengan PriceWaterhouse Coopers.
3. Shidharta dan Widjaja berafiliasi dengan Klynveld Peat Marwick Goeldener (KPMG) International.
4. Osman, Bing, Satrio, dan rekan berafiliasi dengan Delloitte Touche and Tohmatsu.

3.1.3.8 Kepemilikan Saham Institusional.

Kepemilikan institusional adalah jumlah kepemilikan saham oleh pihak institusi antara lain bank, dana pensiun, perusahaan asuransi, dan lembaga keuangan lainnya (Tarjo, 2008). Kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak manajemen melalui proses monitoring secara efektif sehingga dapat mengurangi manajemen laba. Indikator yang digunakan untuk

mengukur kepemilikan institusional adalah persentase jumlah saham yang dimiliki oleh pihak institusi dari seluruh jumlah modal saham yang beredar.

<p>Kepemilikan Saham Institusional (%)</p> $(\%) = \frac{\text{Jumlah Saham yang dimiliki Institusi}}{\text{Jumlah Modal Saham yang Beredar}} \times 100\%$

3.1.4 Variabel Kontrol

Variabel kontrol dalam penelitian ini mengacu pada penelitian Ismail, dkk. (2013), yakni antara lain $GROWTH_{i,t}$; $LEVERAGE_{i,t}$; $SIZE_{i,t}$; $PROFITABILITY_{i,t}$. Adapun formula perhitungan untuk masing-masing variabel kontrol adalah sebagai berikut :

1. $SIZE_{i,t}$ = Logaritma natural dari total aset untuk perusahaan i pada tahun t.
2. $PROFITABILITY_{i,t}$ = Rasio *return on asset* (ROA) untuk perusahaan i pada tahun t.
3. $GROWTH_{i,t}$ = Harga saham dibagi dengan nilai buku ekuitas per lembar saham untuk perusahaan i pada akhir tahun fiskal t.
4. $LEVERAGE_{i,t}$ = Total hutang dibagi dengan total aktiva perusahaan i pada akhir tahun fiskal t.

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pertimbangan untuk memilih populasi perusahaan manufaktur adalah karena perusahaan yang berada dalam satu jenis industri yang sama memiliki karakteristik aktual yang hampir sama. Penentuan sampel menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu penentuan sampel dari populasi yang ada berdasarkan kriteria. Kriteria yang dipakai dalam penentuan sampel adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan manufaktur yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan tidak keluar (*delisting*) dari BEI selama periode tahun 2010 sampai dengan 2013.
2. Perusahaan manufaktur yang menerbitkan *annual report* dan laporan keuangan mulai tahun 2010 sampai dengan 2013.
3. Perusahaan manufaktur yang menerbitkan laporan keuangan per 31 Desember dalam satuan mata uang Rupiah.
4. Perusahaan yang memiliki kelengkapan data mengenai karakteristik *good governance*, diantaranya:
 - Proporsi Dewan Komisaris Independen.
 - Jumlah Rapat Dewan Komisaris.
 - Ukuran Dewan Komisaris.
 - Proporsi Komite Audit Independen.
 - Proporsi Komite Audit yang Memiliki Keahlian Akuntansi dan Keuangan.
 - Jumlah Rapat Komite Audit.

- Kualitas Auditor.
- Kepemilikan Saham Institusional.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari dokumentasi perusahaan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data *annual report*, ICMD, ringkasan kinerja perusahaan tercatat IDX, laporan keuangan auditan perusahaan manufaktur tahun 2010-2013 yang diperoleh dari situs resmi BEI (www.idx.co.id).

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini dengan metode dokumentasi menggunakan data sekunder yang dapat diperoleh dari *annual report* dan laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2010, 2011, 2012, dan 2013. Data sekunder dikumpulkan dan diperoleh dari situs www.idx.co.id. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan pengambilan sampel berdasarkan kriteria tertentu sesuai dengan tujuan penelitian.

3.5 Metode Analisis

3.5.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif dimaksudkan untuk memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian,

maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan *skewness* (Ghozali, 2013). Tujuan analisis ini adalah untuk mengetahui secara ringkas gambaran data yakni tentang ukuran pemusatan data, ukuran penyebaran data, serta kecenderungan suatu gugus data.

i. Uji Beda *T-test*

Uji Beda *t-test* menguji apakah ada perbedaan rata-rata dua sampel yang berhubungan (Ghozali, 2013). Kriteria pengujian menggunakan uji beda *t-test*:

- Apabila nilai signifikansi $< 0,05$ maka H_0 diterima
- Apabila nilai signifikansi $> 0,05$ maka H_0 ditolak.

Uji beda *t-test* dalam penelitian ini digunakan untuk menguji apakah adopsi IFRS dapat menurunkan tingkat manajemen laba setelah standar akuntansi keuangan tersebut diadopsi dan diterapkan di Indonesia pada tanggal 1 Januari 2012. Data yang digunakan untuk menguji penelitian ini diperoleh dengan menghitung rata-rata dari masing-masing nilai *discretionary accruals* pada periode sebelum *full convergence* IFRS tahun 2010-2011 dan periode setelah *full convergence* IFRS tahun 2012-2013.

3.5.3 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik bertujuan untuk mengetahui kelayakan penggunaan model regresi dalam penelitian ini. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya estimasi yang bias, karena tidak semua data dapat diterapkan regresi. Penelitian ini

menggunakan uji multikolinieritas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas, dan uji normalitas.

3.5.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2013). Model yang baik adalah model yang memiliki distribusi normal. Normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada grafik atau dengan melihat histogram dari residualnya. Dasar pengambilan keputusan:

1. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
2. Jika data menyebar jauh dari diagonal atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Uji normalitas dengan grafik dapat menyesatkan apabila tidak hati-hati secara visual. Oleh sebab itu, uji grafik juga dilengkapi dengan uji statistik. Uji statistik yang digunakan adalah uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S) dengan membuat hipotesis:

H_0 : Data residual berdistribusi normal

H_A : Data residual tidak berdistribusi normal

Kriteria yang digunakan dalam uji Kolmogorov-Smirnov adalah sebagai berikut :

1. Jika nilai probabilitas (sig.) $< 0,05$, maka data residual terdistribusi secara tidak normal (Ho ditolak, Ha diterima).
2. Jika nilai probabilitas (sig.) $> 0,05$, maka data residual terdistribusi secara normal (Ho diterima, Ha ditolak).

3.5.3.2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (Ghozali, 2013). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Menurut Ghozali (2013), untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas di dalam model dapat dilakukan dengan memperhatikan:

1. Nilai R^2 yang dihasilkan sangat tinggi, tetapi secara individual variabel-variabel independen banyak yang tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen.
2. Menganalisis matrik korelasi variabel-variabel independen. Jika antara variabel independen ada korelasi yang cukup tinggi, maka hal ini merupakan indikasi adanya multikolinieritas.
3. Melihat nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF). Jika nilai *tolerance* ≤ 0.01 atau sama dengan nilai $VIF \geq 10$, maka model regresi terdapat multikolinieritas.

3.5.3.3 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (Ghozali, 2013). Model regresi yang baik adalah yang bebas dari autokorelasi. Salah satu cara yang sering digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi adalah dengan menggunakan uji Durbin-Watson (*DW test*). Uji Durbin-Watson hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat satu dan mensyaratkan adanya *intercept* (konstanta) dalam model regresi dan tidak ada variabel lag di antara variabel independen. Hipotesis yang akan diuji adalah:

H₀: Tidak ada autokorelasi ($r = 0$)

H_a: Ada autokorelasi ($r \neq 0$)

Tabel 3.1
Pengambilan Keputusan Uji Autokorelasi

Hipotesis nol	Keputusan	Jika
Tidak ada autokorelasi positif	Tolak	$0 < d < dl$
Tidak ada autokorelasi positif	<i>No Decision</i>	$dl \leq d \leq du$
Tidak ada autokorelasi negative	Tolak	$4-dl < d < 4$
Tidak ada autokorelasi negative	<i>No Decision</i>	$4-du \leq d \leq 4-dl$
Tidak ada autokorelasi, positif atau negatif	Tidak Ditolak	$du < d < 4-du$

Metode lain untuk mendeteksi adanya autokorelasi adalah dengan menggunakan Uji Lagrange Multiplier (*LM test*). Uji autokorelasi dengan *LM test*

terutama digunakan untuk sampel besar di atas 100 observasi. Uji ini memang lebih tepat digunakan dibandingkan dengan uji DW terutama bila sampel yang digunakan relatif besar dan derajat autokorelasi lebih dari satu (Ghozali, 2013). Uji LM akan menghasilkan statistic Breusch-Godfrey. Pengujian Breusch-Godfrey dilakukan dengan meregres variabel pengganggu (residual) ut menggunakan autogresive model dengan orde p. Apabila koefisien parameter untuk residual lag (res_2) memberikan probabilitas di atas signifikansi 0,05 maka tidak ada autokorelasi dalam model penelitian tersebut.

Metode lain untuk menguji ada tidaknya autokorelasi adalah dengan menggunakan uji run test. Run test sebagai bagian dari statistic non-parametrik dapat pula digunakan untuk menguji apakah antar residual terdapat korelasi yang tinggi (Ghozali, 2013). Jika antar residual tidak terdapat hubungan korelasi maka dikatakan bahwa residual adalah acak atau random. Run test digunakan untuk melihat apakah data residual terjadi secara random atau tidak. Apabila hasil output SPSS menunjukkan nilai test diatas 0,05 maka tidak ada autokorelasi dalam model penelitian tersebut.

3.5.3.4 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali, 2013). Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya berbeda, maka model tersebut terjadi heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah model yang tidak terjadi heteroskedastisitas.

Ada tidaknya heteroskedastisitas di dalam model regresi dapat dilakukan dengan melihat grafik *scatterplot*. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur, maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Sebaliknya, jika tidak ada pola yang jelas, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Metode lain untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan melakukan uji glejser. Uji Glejser dalam Ghozali (2013) mengusulkan untuk meregres nilai absolut residual terhadap variabel independen (Gujarati, 2003) yang dikenal dengan nama Uji Glejser, dengan persamaan regresi:

$$|U_t| = \alpha + \beta X_t + v_t$$

Apabila koefisien parameter beta dari persamaan regresi tidak signifikan secara statistik, menunjukkan bahwa dalam data model empiris yang diestimasi tidak terdapat heteroskedastisitas.

3.5.4 Analisis Regresi

Dalam penelitian ini teknik analisis yang digunakan untuk menguji pengaruh moderasi yaitu dengan menggunakan Model Nilai Selisih Mutlak. Hal ini disebabkan karena pada model *Moderated Regression Analysis* (MRA) tidak memenuhi persyaratan multikolinieritas. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan bantuan program SPSS 21 untuk menguji pengaruh konvergensi IFRS terhadap manajemen laba yang dimoderasi oleh delapan karakteristik mekanisme *corporate governance*. Menurut (Ghozali, 2013), dalam analisis regresi, selain mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, juga

menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dan variabel independen. Analisis regresi dapat memberikan jawaban mengenai besarnya pengaruh setiap variabel independen terhadap variabel dependennya.

Model Regresi

$$\begin{aligned}
 \text{LNABSDAC}_{it} = & \alpha_0 + \alpha_1 \text{ZIFRS}_{i,t} + \alpha_2 \text{ZDKI}_{i,t} + \alpha_3 \text{ZDKR}_{i,t} + \alpha_4 \text{ZDKU}_{i,t} + \alpha_5 \\
 & \text{ZKAI}_{i,t} + \alpha_6 \text{ZKAAK}_{i,t} + \alpha_7 \text{ZKAR}_{i,t} + \alpha_8 \text{ZKAUDIT}_{i,t} + \alpha_9 \\
 & \text{ZKEPINS}_{i,t} + \alpha_{10} \text{ABSZIFRS_ZDKI}_{i,t} + \alpha_{11} \\
 & \text{ABSZIFRS_ZDKR}_{i,t} + \alpha_{12} \text{ABSZIFRS_ZDKU}_{i,t} + \alpha_{13} \\
 & \text{ABSZIFRS_KAI}_{i,t} + \alpha_{14} \text{ABSZIFRSZ_ZKAAK}_{i,t} + \alpha_{15} \\
 & \text{ABSZIFRS_ZKAR}_{i,t} + \alpha_{16} \text{ABSZIFRS_ZKAUDIT}_{i,t} + \alpha_{17} \\
 & \text{ABSZIFRS_ZKEPINS}_{i,t} + \alpha_{18} \text{SIZE}_{i,t} + \alpha_{19} \text{PROF}_{i,t} + \alpha_{20} \\
 & \text{GROWTH}_{i,t} + \alpha_{21} \text{LEV}_{i,t} + \\
 & \varepsilon \dots\dots\dots(1)
 \end{aligned}$$

Keterangan :

α_0	= Konstanta
LNABSDAC_{it}	= Manajemen laba diproksi dengan <i>discretionary accrual</i> .
ZIFRS	= Konvergensi IFRS
$\text{ZDKI}_{i,t}$	= Proporsi Dewan Komisaris Independen.
$\text{ZDKR}_{i,t}$	= Jumlah Rapat Dewan Komisaris.
$\text{ZDKU}_{i,t}$	= Ukuran Dewan Komisaris.
$\text{ZKAI}_{i,t}$	= Proporsi Komite Audit Independen.
$\text{ZKAAK}_{i,t}$	= Proporsi Komite Audit yang memiliki keahlian akuntansi dan keuangan.

ZKAR _{i,t}	= Jumlah Rapat Komite Audit.
ZKAUDIT _{i,t}	= Kualitas Auditor.
ZKEPINS _{i,t}	= Kepemilikan Saham Institusional.
ABSZIFRS_ZDKI	= Interaksi Konvergensi IFRS dengan Dewan Komisaris Independen.
ABSZIFRS_ZDKR	= Interaksi Konvergensi IFRS dengan Jumlah Rapat Dewan Komisaris.
ABSZIFRS_ZDKU	= Interaksi Konvergensi IFRS dengan Ukuran Dewan Komisaris.
ABSZIFRS_ZKAI	= Interaksi Konvergensi IFRS dengan Komite Audit Independen.
ABSZIFRS_ZKAAK	= Interaksi Konvergensi IFRS dengan Komite Audit yang Memiliki Keahlian Akuntansi dan Keuangan.
ABSZIFRS_ZKAR	= Interaksi Konvergensi IFRS dengan Jumlah Rapat Komite Audit.
ABSZIFRS_ZKAUDIT	= Interaksi Konvergensi IFRS dengan Kualitas Auditor.
ABSZIFRS_ZKEPINS	= Interaksi Konvergensi IFRS dengan Kepemilikan Institusional.
SIZE _{i,t}	= <i>Size</i> (Ukuran Perusahaan).
PROF _{i,t}	= <i>Profitability</i> .
GROWTH _{i,t}	= <i>Growth</i> (Pertumbuhan Perusahaan).
LEV _{i,t}	= <i>Leverage</i> .

3.5.5 Uji Hipotesis

3.5.5.1 Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi (R²) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2013).

Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu ($0 < R < 1$). Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai koefisien determinasi yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

3.5.5.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat atau dependen (Ghozali, 2013). Pengujian dapat dilakukan dengan cara jika nilai probabilitas (signifikansi) lebih besar dari 0,05 (0) maka variabel independen secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Jika probabilitas lebih kecil dari 0,05 maka variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen.

3.5.5.3 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Nilai signifikansi (α) yang digunakan dalam penelitian ini adalah 5% dan 10%. Uji statistik t dapat dilakukan dengan melihat nilai probabilitas signifikansi t masing-masing variabel yang terdapat pada output hasil analisis regresi yang menggunakan SPSS versi 21.0. Kriteria yang digunakan dalam uji statistik t adalah sebagai berikut:

1. Jika $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ dan nilai probabilitas lebih kecil dari nilai signifikansi ($\text{sig.} < 0,05$), maka variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen (H_a diterima dan H_0 ditolak).
2. Jika $t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}$ dan nilai probabilitas lebih besar dari tingkat signifikansi ($\text{sig.} > 0,05$), maka variabel independen tidak terpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen (H_a ditolak dan H_0 diterima).

BAB IV

HASIL DAN ANALISIS

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang *listed* di Bursa Efek Indonesia untuk periode 2010-2013. Metode pemilihan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* dengan beberapa ketentuan. Sampel dibatasi hanya terhadap perusahaan yang menerbitkan *annual report* tahun 2010-2013 dan perusahaan yang memiliki informasi data tentang mekanisme *corporate governance*.

Berdasarkan data yang diperoleh dari *Indonesia Capital Market Directory* (ICMD) 2010-2013, diketahui bahwa perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI dan tidak *delisting* selama periode tersebut adalah sebanyak 138 perusahaan. Dari jumlah tersebut, hanya 49 perusahaan per tahun yang memenuhi kriteria sampel penelitian yang telah ditetapkan. Periode pengamatan penelitian ini adalah empat tahun (dua tahun sebelum IFRS dan dua tahun sesudah *full convergence* IFRS) sehingga total data yang diolah adalah sebanyak $49 \times 4 = 196$ data pengamatan. Berikut ini adalah perincian sampel penelitian:

Tabel 4.1
Perolehan Sampel Penelitian

Kriteria Sampel	Jumlah Perusahaan
Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selama periode 2010-2013 (tidak <i>delisting</i>)	138
Tidak memiliki data yang lengkap terkait dengan delapan karakteristik <i>corporate governance</i> , diantaranya: <ul style="list-style-type: none"> - Dewan Komisaris Independen - Jumlah Rapat Dewan Komisaris - Ukuran Dewan Komisaris - Komite Audit Independen - Komite Audit yang Memiliki Keahlian Akuntansi dan Keuangan - Jumlah Rapat Komite Audit - Kualitas Auditor - Kepemilikan Institusional 	(75)
Perusahaan manufaktur yang tidak menerbitkan laporan keuangan per 31 Desember dalam satuan mata uang Rupiah.	(14)
Sampel penelitian	49
Total sampel observasi periode 2010-2013 = 49 x 4 tahun	196

4.2 Analisis Data

4.2.1 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), deviasi standar, nilai minimum, dan nilai maksimum dari masing-masing variabel penelitian. Berikut adalah hasil analisis statistik deskriptif dalam penelitian ini :

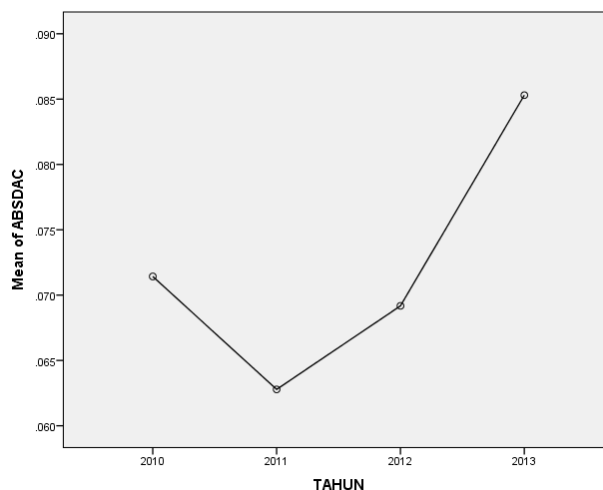
Tabel 4.2
Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

	N	Rata-rata	Deviasi Standar	Minimum	Maksimum
ABSDAC	196	0,0722	0,0706	0,0003	0,3930
DKI	196	0,3997	0,1300	0,2500	1,0000
DKR	196	5,2500	5,5989	1,0000	43,0000
DKU	196	4,4643	2,0340	2,0000	12,0000
KAI	196	0,7037	0,3352	0,0000	1,0000
KAAC	196	0,7866	0,2448	0,2500	1,0000
KAR	96	6,3469	5,0089	1,0000	41,0000
KEPINS	196	0,7094	0,2139	0,0000	0,9914
SIZE	196	6,1514	0,7274	4,3172	8,3304
PROF	196	0,1017	0,3682	-4,3362	0,9246
GROWTH	196	3,2911	7,1024	-1,1444	47,2692
LEV	196	1,3133	1,8702	-10,3407	14,3831

Hasil analisis deskriptif di atas menunjukkan bahwa jumlah observasi (N) dari penelitian ini adalah 196. Variabel manajemen laba yang diukur dengan nilai absolut *discretionary accrual* dengan estimasi model *modified Jones*. Nilai *absolut discretionary accrual* (ABSDAC) dengan estimasi model *modified Jones* diperoleh rata-rata sebesar 0,0722. Manajemen laba dalam hal ini dilakukan dengan cara menaikkan laba maupun menurunkan laba. Nilai minimum *discretionary accrual* adalah sebesar 0,0003 yang menunjukkan tindakan menurunkan laba dengan melaporkan laba lebih rendah, sedangkan nilai *discretionary accrual* tertinggi adalah sebesar 0,3930 yang menunjukkan adanya manajemen laba dengan melaporkan laba lebih tinggi. Tren estimasi manajemen laba selama tahun 2010 – 2013 atau dua

tahun sebelum IFRS dan dua tahun setelah penerapan IFRS ditunjukkan sebagai berikut:

Gambar 4.1
Pola Manajemen Laba pada 2 Tahun Sebelum hingga 2 Tahun Sesudah IFRS



Sumber: Data sekunder yang diolah, 2015

Rata-rata proporsi komisaris independen (DKI) dari perusahaan sampel diperoleh sebesar 0,3997 atau 39,97%. Hal ini berarti bahwa jumlah komisaris independen dari perusahaan sampel rata-rata sebesar 39,97% dari seluruh jumlah dewan komisaris. Kondisi demikian menunjukkan bahwa secara rata-rata perusahaan-perusahaan sampel telah memenuhi syarat minimal 30% anggota dewan komisaris independen. Jumlah terendah adalah sebesar 0,2500 atau 25,00% dan jumlah tertinggi mencapai 1,00 atau 100,0%.

Jumlah pertemuan komisaris (DKR) dalam satu tahun dari perusahaan sampel rata-rata dari seluruh sampel diperoleh sebesar 5,25 atau sebanyak 5 kali, dengan pertemuan komisaris yang paling kecil sebanyak 1 kali dan pertemuan

komite audit yang paling banyak adalah 43 kali. Adanya pertemuan yang semakin banyak akan memberikan intensitas pengawasan yang lebih besar kepada direksi.

Jumlah atau ukuran dewan komisaris (DKU) dalam satu tahun dari perusahaan sampel rata-rata dari seluruh sampel diperoleh sebesar 4,4643 atau sebanyak 4 orang, dengan ukuran komisaris yang paling kecil sebanyak 2 orang dan ukuran dewan komisaris yang paling banyak adalah 12 orang.

Rata-rata proporsi komite audit independen (KAI) dari perusahaan sampel diperoleh sebesar 0,7037 atau 70,37%. Hal ini berarti bahwa jumlah komite audit independen dari perusahaan sampel rata-rata sebesar 70,37% dari seluruh jumlah komite audit. Kondisi demikian menunjukkan bahwa secara rata-rata perusahaan-perusahaan sampel telah banyak yang memenuhi syarat independensi komite audit, sedangkan sisanya menunjukkan ada anggota komite audit yang tidak independen. Jumlah terendah adalah sebesar 0,0000 atau 0,00% dan jumlah tertinggi mencapai 1,00 atau 100,0%.

Mengenai keahlian keuangan komite audit (KAAK) dari perusahaan sampel diperoleh nilai rata-rata sebesar 0,7866. Hal ini berarti bahwa 78,66% anggota komite audit memiliki keahlian akuntansi dan keuangan. Keahlian keuangan komite audit terkecil adalah sebesar 0,25 atau 25,00% dan keahlian keuangan komite audit terbesar adalah 100%.

Jumlah pertemuan komite audit (KAR) dalam satu tahun dari perusahaan sampel rata-rata dari seluruh sampel diperoleh sebesar 6,3469 atau sebanyak 6 kali, dengan pertemuan komite audit yang paling kecil sebanyak 1 kali dan pertemuan komite audit yang paling banyak adalah 41 kali. Adanya pertemuan komite audit

yang semakin banyak akan memberikan intensitas pengawasan yang lebih besar kepada direksi.

Deskripsi mengenai kepemilikan saham oleh institusi (KEPINS) menunjukkan rata-rata sebesar 0,7094 atau 70,94%. Hal ini berarti bahwa rata-rata saham dari perusahaan sampel selama tahun 2010 – 2013, 70,94% sahamnya dimiliki oleh institusi atau organisasi lain (perusahaan atau institusi lain). Nilai terendah dari kepemilikan saham manajerial adalah sebesar 0,00% dan nilai tertinggi adalah 99,14%. Tingginya kepemilikan saham institusi dapat berfungsi sebagai pengontrol manajemen.

Variabel kontrol ukuran perusahaan (SIZE) yang dihitung dari logaritma natural dari total asset menunjukkan rata-rata sebesar 6,1514 dengan nilai ukuran perusahaan terkecil adalah sebesar 4,3172 dan nilai ukuran perusahaan yang tertinggi adalah sebesar 8,3304.

Rasio profitabilitas (PROF) yang diukur menggunakan ROA sebagai kontrol selama tahun 2010 – 2013 menunjukkan rata-rata sebesar 0,1017 atau sebesar 10,17%. Nilai minimum rasio ROA adalah sebesar -4,3362, sedangkan nilai rasio ROA tertinggi adalah sebesar 0,9246.

Pertumbuhan perusahaan (GROWTH) dalam penelitian ini diukur dengan *market to book value of equity* (MBV) yang dimiliki perusahaan menunjukkan rata-rata sebesar 3,2911. Hal ini berarti bahwa rata-rata perusahaan memiliki nilai pasar aset mengalami kenaikan sebesar 3,2911 kali lebih besar dibanding nilai buku ekuitasnya. Nilai GROWTH yang lebih besar dari 1 menunjukkan bahwa

perusahaan mengalami pertumbuhan nilai pasar sahamnya. Pertumbuhan terendah adalah sebesar -1,1444 dan GROWTH tertinggi adalah sebesar 47,2692.

Variabel leverage (LEV) yang diukur dengan *Debt to equity asset* menunjukkan rata-rata sebesar 1,3133. Hal ini berarti bahwa perusahaan sampel rata-rata memiliki hutang sebesar 131,33% dari ekuitas yang dimiliki perusahaan. Nilai rata-rata leverage yang lebih kecil dari 1 menunjukkan bahwa perusahaan lebih banyak menggunakan pendanaan dari modal sendiri dibanding hutang kepada pihak ketiga. Nilai Leverage terendah adalah -10,3407 dan Leverage tertinggi adalah 14,3831.

Tabel 4.3
Frekuensi Variabel Dummy

		Frekuensi	Persentase
IFRS	Proporsi (Dummy = 0)	98	50%
	Proporsi (Dummy = 1)	98	50%
KAUDIT	Proporsi (Dummy = 0)	106	54,1%
	Proporsi (Dummy = 1)	90	45,9%

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2015

Konvergensi IFRS yang diukur dengan menggunakan variabel *dummy* spesifikasi periode yang belum konvergensi penuh IFRS dan periode yang telah konvergensi penuh IFRS dari perusahaan sampel menunjukkan rata-rata 0,5. Hal ini berarti 50% perusahaan sampel belum mengkonvergensi secara penuh standar pelaporan keuangan berbasis IFRS, dan sisanya perusahaan telah mengkonvergensi secara penuh standar pelaporan keuangan berbasis IFRS.

Kualitas auditor (KAUDIT) yang diukur dengan menggunakan *dummy* spesifikasi KAP Big 4 dan Non Big 4 dari perusahaan sampel menunjukkan rata-rata sebesar 0,459. Hal ini berarti 45,9% perusahaan sampel diaudit oleh KAP Big 4 dan sisanya diaudit oleh KAP Non Big 4.

4.2.2 Uji Beda *T-test*

Uji beda *t-test* menguji apakah ada perbedaan rata-rata dua sampel yang berhubungan (Ghozali, 2013). Penelitian ini menggunakan uji beda *t-test* untuk menguji apakah konvergensi IFRS dapat menurunkan tingkat manajemen laba setelah standar akuntansi keuangan tersebut dikonvergensi dan diterapkan di Indonesia pada tanggal 1 Januari 2012. Dalam hal ini akan dilihat apakah terdapat perbedaan antara nilai *discretionary accruals* pada periode sebelum *full convergence* IFRS tahun 2010-2011 dan pada periode setelah *full convergence* IFRS tahun 2012-2013.

Tabel 4.4
Hasil Statistik Uji Beda *T-test*

	N	Rata-rata	Deviasi Standar
2010-2011	98	0,067105	0,073435
2012-2013	98	0,077239	0,067665

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2015

Hasil output SPSS menunjukkan jumlah sampel penelitian sebanyak 98 dengan nilai rata-rata dan deviasi standar pada setiap periode sebelum dan sesudah *full convergence* IFRS. Pada periode tahun 2010-2011 menunjukkan nilai rata-rata absolut *discretionary accruals* (ABSDAC) sebesar 0,067105 dengan deviasi standar 0,073435. Sedangkan periode tahun 2012-2013 menunjukkan nilai rata-rata

absolut *discretionary accruals* (ABSDAC) yang lebih tinggi sebesar 0,077239 dengan deviasi standar 0,067665.

Tabel 4.5
Hasil Uji Beda *T-test*

<i>Test Value</i>	
t	<i>Sig. (2-tailed)</i>
-1,162	0,248

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2015

Berdasarkan pengujian menggunakan uji beda *t-test* didapatkan bahwa perbedaan manajemen laba periode sebelum dan sesudah *full convergence* IFRS tidak signifikan secara statistik. Hal ini dapat di lihat dari nilai signifikansi sebesar 0,248 lebih besar dari pada 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan manajemen laba periode setelah *full converge* IFRS dengan periode sebelum *full convergence* IFRS di Indonesia.

4.2.3 Pengujian Asumsi Klasik

Analisis data dan pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan model regresi uji nilai selisih mutlak. Untuk mengetahui apakah model regresi benar-benar menunjukkan hubungan yang signifikan dan mewakili (*representative*), maka model tersebut harus memenuhi uji asumsi klasik regresi, yang meliputi:

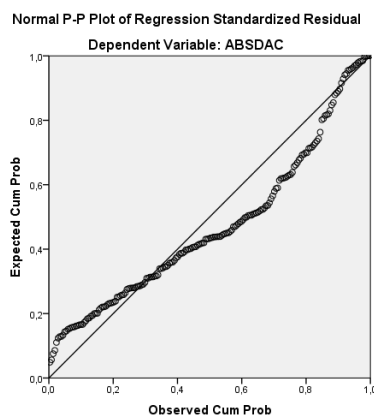
4.2.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Untuk melihat model

regresi normal atau tidak, dilakukan analisis grafik dengan melihat “*normal probability report plot*” yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal, dan plotting data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data residu normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya (Ghozali, 2013).

Metode lain untuk memperkuat tingkat normalitas data akan digunakan uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov, uji ini digunakan untuk memberikan angka-angka yang lebih detail untuk menguatkan apakah terjadi normalitas atau tidak dari data-data yang digunakan. Normalitas dapat terjadi apabila hasil dari uji Kolmogorov-Smirnov lebih dari 0,05 (Ghozali, 2013). Analisis ini menggunakan analisis regresi linier dengan syarat model regresi yang baik adalah distribusi data masing-masing variabel yang normal atau mendekati normal. Pengujian normalitas dilakukan dengan Uji Kolmogorov– Smirnov yang dilakukan terhadap nilai residual. Hasil pengujian diperoleh sebagai berikut:

Gambar 4.2
Hasil Uji Normalitas I ABSDAC



Sumber: Data sekunder yang diolah, 2015

Tabel 4.6
Hasil Uji Statistik Kolmogorov-Smirnov Test I ABSDAC

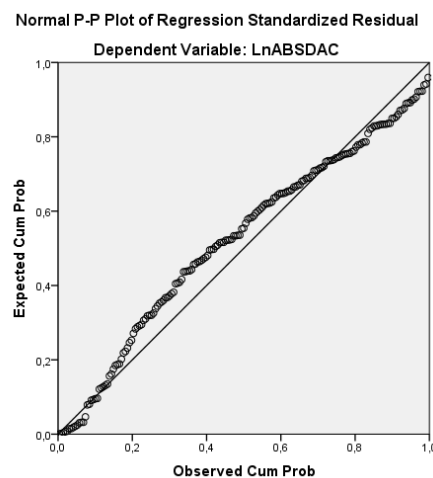
Model	Keterangan	<i>Unstandardized Residual</i>
I	Kolmogorov-Smirnov Z	2,044
	Asymp. Sig. (2-tailed)	0,000

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2015

Hasil pengujian normalitas pada pengujian terhadap seluruh data menunjukkan bahwa nilai residual tidak berdistribusi normal yang ditunjukkan dengan nilai signifikansi pengujian Kolmogorov Smirnov tersebut lebih kecil dari 0,05.

Untuk mendapatkan data yang terdistribusi secara normal, selanjutnya dilakukan dengan mengeluarkan data-data outlier dan transformasi ln. dengan melihat pola variabel ABSDAC terlalu menumpuk di sisi kiri maka dilakukan transformasi Ln.

Gambar 4.3
Hasil Uji Normalitas II LNABSDAC



Sumber: Data sekunder yang diolah, 2015

Tabel 4.7
Hasil Uji Statistik Kolmogorov-Smirnov Test 1I LNABSDAC

Model	Keterangan	<i>Unstandardized Residual</i>
I	Kolmogorov-Smirnov Z	1,331
	Asymp. Sig. (2-tailed)	0,058

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2015

Hasil pengujian normalitas pada pengujian terhadap data residual setelah mengeluarkan data outlier menunjukkan bahwa nilai residual sudah terdistribusi secara normal. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi pengujian Kolmogorov Smirnov tersebut sebesar 0,058 yang lebih besar dari 0,05.

4.2.3.2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen (Ghozali, 2013). Multikolonieritas dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF). Multikolonieritas terjadi jika nilai *tolerance* < 0,10 atay nilai VIF > 10.

Tabel 4.8
Hasil Uji Multikolinieritas dengan *Tolerance* dan VIF

Variabel	<i>Tolerance</i>	VIF	Keterangan
ZIFRS	0,739	1,352	Tidak terjadi multikolinieritas
SIZE	0,391	2,560	Tidak terjadi multikolinieritas
PROF	0,445	2,249	Tidak terjadi multikolinieritas
GROWTH	0,511	1,958	Tidak terjadi multikolinieritas
LEV	0,737	1,357	Tidak terjadi multikolinieritas
ZDKI	0,415	2,407	Tidak terjadi multikolinieritas
ZDKR	0,686	1,458	Tidak terjadi multikolinieritas
ZDKU	0,456	2,193	Tidak terjadi multikolinieritas
ZKAI	0,809	1,236	Tidak terjadi multikolinieritas
ZKAAK	0,803	1,246	Tidak terjadi multikolinieritas
ZKAR	0,424	2,361	Tidak terjadi multikolinieritas
ZKAUDIT	0,471	2,124	Tidak terjadi multikolinieritas
ZKEPINS	0,805	1,242	Tidak terjadi multikolinieritas
ABSZIFRS_ZDKI	0,524	1,910	Tidak terjadi multikolinieritas
ABSZIFRS_ZDKR	0,695	1,439	Tidak terjadi multikolinieritas
ABSZIFRS_ZDKU	0,586	1,705	Tidak terjadi multikolinieritas
ABSZIFRS_ZKAI	0,835	1,198	Tidak terjadi multikolinieritas
ABSZIFRS_ZKAAK	0,796	1,256	Tidak terjadi multikolinieritas
ABSZIFRS_ZKAR	0,463	2,159	Tidak terjadi multikolinieritas
ABSZIFRS_ZKAUDIT	0,733	1,364	Tidak terjadi multikolinieritas
ABSZIFRS_ZKEPINS	0,796	1,256	Tidak terjadi multikolinieritas

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2015

Pada tabel 4.8 hasil uji multikolinieritas, semua nilai *tolerance* berada di atas 0,10 atau $\geq 0,10$ dan semua nilai VIF berada dibawah angka 10 atau ≤ 10 . Hal ini menunjukkan bahwa tidak adanya multikolinieritas dalam model regresi.

4.2.3.3 Uji Autokorelasi

Uji korelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu

pada periode $t-1$ (sebelumnya). Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya (Ghozali, 2013). Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Berikut ini merupakan hasil dari Uji Lagrange Multiplier (*LM Test*):

Tabel 4.9
Hasil Uji Autokorelasi dengan Lagrange Multiplier (*LM Test*)

Variabel	t	Sig.	Keterangan
RES_II (LAGRES_I)	0,107	0,915	Tidak terjadi autokorelasi

Sumber : Data sekunder diolah, 2015

Berdasarkan hasil uji autokorelasi dengan LM test menunjukkan bahwa koefisien parameter untuk RES II atau melainkan LAGRES_I memberikan probabilitas signifikan sebesar 0,915. Hal ini menunjukkan indikasi tidak terjadinya autokorelasi.

Tabel 4.10
Hasil Uji Autokorelasi dengan Run Test

Model	Keterangan	<i>Unstandardized Residual</i>
I	Test Value (a)	0,15025
	Asymp. Sig. (2-tailed)	0,418

Sumber : Data sekunder diolah, 2015

Berdasarkan hasil tampilan *output* SPSS pada model regresi I menunjukkan bahwa nilai test adalah 0,15025 dengan probabilitas signifikan sebesar 0,418. Hal

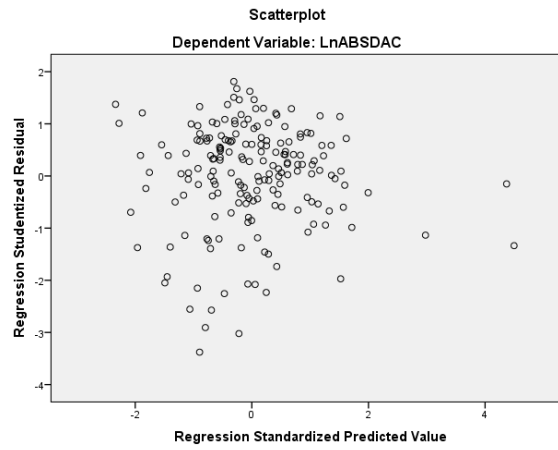
ini menunjukkan indikasi tidak terjadinya autokorelasi dan sesuai dengan uji LM Test yang juga mengindikasikan tidak terjadinya autokorelasi.

4.2.3.4 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.

Dalam penelitian ini uji heteroskedastisitas menggunakan grafik *scatterplot* dan uji glejser. Pengujian heteroskedastisitas dengan menggunakan grafik *scatterplot* dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik *scatterplot*. Indikasi terjadinya heteroskedastisitas adalah jika adanya pola tertentu yang menyerupai titik-titik yang teratur seperti bergelombang, melebar kemudian menyempit. Sedangkan pada uji glejser, indikasi terjadinya heteroskedastisitas adalah jika variabel independen tidak signifikan secara statistik mempengaruhi variabel bebas.

Gambar 4.4
Grafik *Scatterplot* LNABSDAC



Sumber: Data sekunder yang diolah, 2015

Dari grafik *scatterplot* diatas terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak diatas dan dibawah angka 0 dan tidak membentuk pola tertentu. Sehingga hal ini menunjukan bahwa tidak terjadinya heteroskedastisitas pada model regresi.

Tabel 4.11
Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan Uji Glejser

Variabel	t	Sig	Keterangan
ZIFRS	-1,432	0,154	Tidak terjadi heteroskedastisitas
SIZE	0,111	0,911	Tidak terjadi heteroskedastisitas
PROF	-0,519	0,605	Tidak terjadi heteroskedastisitas
GROWTH	-0,473	0,637	Tidak terjadi heteroskedastisitas
LEV	0,216	0,829	Tidak terjadi heteroskedastisitas
ZDKI	0,048	0,962	Tidak terjadi heteroskedastisitas
ZDKR	0,304	0,761	Tidak terjadi heteroskedastisitas
ZDKU	0,443	0,659	Tidak terjadi heteroskedastisitas
ZKAI	0,693	0,490	Tidak terjadi heteroskedastisitas
ZKAAK	0,231	0,818	Tidak terjadi heteroskedastisitas
ZKAR	-1,076	0,283	Tidak terjadi heteroskedastisitas
ZKAUDIT	-0,906	0,366	Tidak terjadi heteroskedastisitas
ZKEPINS	0,097	0,923	Tidak terjadi heteroskedastisitas
ABSZIFRS_ZDKI	-0,405	0,686	Tidak terjadi heteroskedastisitas
ABSZIFRS_ZDKR	0,246	0,806	Tidak terjadi heteroskedastisitas
ABSZIFRS_ZDKU	-0,582	0,561	Tidak terjadi heteroskedastisitas
ABSZIFRS_ZKAI	1,454	0,148	Tidak terjadi heteroskedastisitas
ABSZIFRS_ZKAAK	-1,202	0,231	Tidak terjadi heteroskedastisitas
ABSZIFRS_ZKAR	-0,222	0,825	Tidak terjadi heteroskedastisitas
ABSZIFRS_ZKAUDIT	0,714	0,476	Tidak terjadi heteroskedastisitas
ABSZIFRS_ZKEPINS	-0,284	0,777	Tidak terjadi heteroskedastisitas

Sumber: Data sekunder diolah, 2015

Pada tabel 4.11 hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa tidak ada satupun variabel independen yang signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen nilai Absolut Ut (AbsUt). Hal ini terlihat dari probabilitas signifikansinya di atas tingkat kepercayaan 5%. Jadi dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya Heteroskedastisitas. Hal ini konsisten dengan grafik *scatterplot*. Sehingga dapat disimpulkan model regresi dalam penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas.

4.2.4 Hasil Pengujian Regresi Berganda

4.2.4.1 Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji-F)

Tujuan dari uji ini adalah untuk menunjukkan apakah semua variabel bebas dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terkait. Uji signifikansi simultan dilakukan dengan cara melihat besarnya nilai F hitung dan nilai signifikansinya. Jika nilai F hitung dengan nilai signifikansi di bawah 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel bebas dalam model regresi mempunyai pengaruh bersama-sama secara signifikan terhadap variabel terkait.

Tabel 4.12
Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

F	Sig.
1,985	0,009

Sumber: Data sekunder diolah, 2015

Dari uji F pada tabel 4.10 diperoleh nilai F hitung sebesar 1,985 dengan tingkat signifikansi jauh lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,009. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi mempunyai pengaruh bersama-sama secara signifikan terhadap variabel terikat.

4.2.4.2 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Tujuan dari uji koefisien determinasi adalah untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terkait. Uji koefisien determinasi dilakukan dengan cara melihat nilai *adjusted R²*. Semakin besar nilai *R²* menunjukkan bahwa kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat baik.

Tabel 4.13
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

R	R^2	Adjusted R^2
0,451	0,204	0,101

Sumber: Data sekunder diolah, 2015

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi (R^2) pada tabel 4.13 menunjukkan nilai *adjusted* R^2 adalah 0,101. Hasil ini menunjukkan bahwa 10,1% manajemen laba dapat dijelaskan oleh variabel konvergensi IFRS sebagai independen, *Size*, *Profitability*, *Growth*, dan *Leverage* sebagai kontrol, serta variabel mekanisme *corporate governance* (GCG) sebagai variabel pemoderasi, sedangkan sisanya 89,9% manajemen laba dapat dijelaskan oleh variabel lain.

4.2.4.3 Hasil Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji-t)

Tujuan dari uji signifikansi parameter individual (uji statistik t) adalah untuk menunjukkan seberapa besar pengaruh satu variabel independen secara individual menerangkan variasi variabel dependen dan variabel kontrol. Pengujian statistik t dilakukan dengan cara melihat koefisien regresi (β), nilai t, dan nilai signifikansinya.

Tabel 4.14
Hasil Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Variabel	β	t	Sig.
ZIFRS	0,196	2,077	0,039**
SIZE	0,315	1,728	0,086*
PROF	2,170	2,477	0,014**
GROWTH	-0,008	-0,488	0,626
LEV	0,131	2,140	0,034**
ZDKI	-0,097	-0,772	0,441
ZDKR	0,296	1,410	0,160
ZDKU	-0,064	-0,545	0,587
ZKAI	-0,085	-0,941	0,348
ZKAAK	0,090	1,010	0,314
ZKAR	0,070	0,572	0,568
ZKAUDIT	-0,013	-0,112	0,911
ZKEPINS	-0,045	-0,498	0,619
ABSZIFRS_ZDKI	0,153	1,114	0,267
ABSZIFRS_DKR	-0,051	-0,236	0,814
ABSZIFRS_ZDKU	0,120	0,958	0,340
ABSZIFRS_ZKAI	-0,087	-0,898	0,371
ABSZIFRS_ZKAAK	0,225	2,169	0,032**
ABSZIFRS_KAR	-0,119	-0,914	0,362
ABSZIFRS_KAUDIT	0,019	0,195	0,845
ABSZIFRS_ZKEPINS	-0,044	-0,401	0,689

Sumber: Data sekunder diolah, 2015

Berdasarkan hasil uji regresi dengan menggunakan metode uji selisih mutlak, variabel baik independen maupun kontrol dimasukkan ke dalam model regresi. Variabel independen konvergensi IFRS, variabel kontrol profitabilitas (PROF), *leverage* (LEV), dan variabel interaksi konvergensi IFRS

dengan Komite Audit yang Memiliki Keahlian Akuntansi dan Keuangan (ABSZIFRS_ZKAAK) signifikan berada di bawah angka 0,05 (tingkat signifikansi 5%). Sedangkan variabel kontrol ukuran perusahaan (SIZE) signifikan berada di bawah angka 0,01 (tingkat signifikansi 10%). Namun beberapa variabel lain di dalam penelitian tidak signifikan karena berada di atas tingkat signifikansi 5% dan 10%.

Hasil pengujian hipotesis pertama yang menggunakan metode uji selisih mutlak dalam penelitian ini dijelaskan dalam tabel 4.14. Hipotesis pertama yaitu konvergensi IFRS (ZIFRS) berpengaruh negatif terhadap manajemen laba (LNABSDAC) yang diukur menggunakan proksi *discretionary accruals* memiliki nilai t sebesar 2,077 dengan signifikansi sebesar 0,039. Oleh karena nilai signifikansi di bawah 0,05 dan nilai β memiliki arah positif (+), maka **hipotesis 1 ditolak**.

Hasil pengujian hipotesis kedua yang menggunakan metode uji selisih mutlak dalam penelitian ini dijelaskan dalam tabel 4.14. Hipotesis kedua yaitu proporsi dewan komisaris independen memoderasi pengaruh konvergensi IFRS terhadap manajemen laba yang dijelaskan oleh variabel interaksi ABSZIFRS_ZDKI memiliki nilai t sebesar 1,114 dengan signifikansi sebesar 0,267. Oleh karena nilai signifikansi jauh di atas 0,05 dan nilai β memiliki arah positif (+), maka **hipotesis 2 ditolak**.

Hasil pengujian hipotesis ketiga yang menggunakan metode uji selisih mutlak dalam penelitian ini dijelaskan dalam tabel 4.14. Hipotesis ketiga yaitu jumlah rapat dewan komisaris memoderasi pengaruh konvergensi IFRS terhadap

manajemen laba yang dijelaskan oleh variabel interaksi ABSZIFRS_ZDKR memiliki nilai t sebesar -0,236 dengan signifikansi sebesar 0,814. Oleh karena nilai signifikansi jauh di atas 0,05 dan nilai β memiliki arah negatif (-), maka **hipotesis 3 ditolak**.

Hasil pengujian hipotesis keempat yang menggunakan metode uji selisih mutlak dalam penelitian ini dijelaskan dalam tabel 4.14. Hipotesis keempat yaitu ukuran dewan komisaris memoderasi pengaruh konvergensi IFRS terhadap manajemen laba yang dijelaskan oleh variabel interaksi ABSZIFRS_ZDKU memiliki nilai t sebesar 0,958 dengan signifikansi sebesar 0,340. Oleh karena nilai signifikansi jauh di atas 0,05 dan nilai β memiliki arah positif (+), maka **hipotesis 4 ditolak**.

Hasil pengujian hipotesis kelima yang menggunakan metode uji selisih mutlak dalam penelitian ini dijelaskan dalam tabel 4.14. Hipotesis kelima yaitu proporsi komite audit independen memoderasi pengaruh konvergensi IFRS terhadap manajemen laba yang dijelaskan oleh variabel interaksi ABSZIFRS_ZKAI memiliki nilai t sebesar -0,898 dengan signifikansi sebesar 0,371. Oleh karena nilai signifikansi jauh di atas 0,05 dan nilai β memiliki arah negatif (-), maka **hipotesis 5 ditolak**.

Hasil pengujian hipotesis keenam yang menggunakan metode uji selisih mutlak dalam penelitian ini dijelaskan dalam tabel 4.14. Hipotesis keenam yaitu proporsi komite audit yang memiliki keahlian akuntansi dan keuangan memoderasi pengaruh konvergensi IFRS terhadap manajemen laba yang dijelaskan oleh variabel interaksi ABSZIFRS_ZKAAK memiliki nilai t sebesar 2,169 dengan signifikansi

sebesar 0,032. Oleh karena nilai signifikansi di bawah 0,05 dan nilai β memiliki arah positif (+), maka **hipotesis 6 diterima**.

Hasil pengujian hipotesis ketujuh yang menggunakan metode uji selisih mutlak dalam penelitian ini dijelaskan dalam tabel 4.14. Hipotesis ketujuh yaitu jumlah rapat komite audit memoderasi pengaruh konvergensi IFRS terhadap manajemen laba yang dijelaskan oleh variabel interaksi ABSZIFRS_ZKAR memiliki nilai t sebesar -0,914 dengan signifikansi sebesar 0,362. Oleh karena nilai signifikansi jauh di atas 0,05 dan nilai β memiliki arah negatif (-), maka **hipotesis 7 ditolak**.

Hasil pengujian hipotesis kedelapan yang menggunakan metode uji selisih mutlak dalam penelitian ini dijelaskan dalam tabel 4.14. Hipotesis kedelapan yaitu kualitas auditor memoderasi pengaruh konvergensi IFRS terhadap manajemen laba yang dijelaskan oleh variabel interaksi ABSZIFRS_ZKAUDIT memiliki nilai t sebesar 0,195 dengan signifikansi sebesar 0,845. Oleh karena nilai signifikansi jauh di atas 0,05 dan nilai β memiliki arah positif (+), maka **hipotesis 8 ditolak**.

Hasil pengujian hipotesis kesembilan yang menggunakan metode uji selisih mutlak dalam penelitian ini dijelaskan dalam tabel 4.14. Hipotesis kesembilan yaitu kepemilikan institusional memoderasi pengaruh konvergensi IFRS terhadap manajemen laba yang dijelaskan oleh variabel interaksi ABSZIFRS_ZEPINS memiliki nilai t sebesar -0,401 dengan signifikansi sebesar 0,689. Oleh karena nilai signifikansi jauh di atas 0,05 dan nilai β memiliki arah negatif (-), maka **hipotesis 9 ditolak**.

Tabel 4.15
Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis

	Hipotesis	Hasil
H1	Konvergensi IFRS Berpengaruh Negatif Terhadap Manajemen Laba	Ditolak
H2	Proporsi Dewan Komisaris Independen Memoderasi Pengaruh Konvergensi IFRS terhadap Manajemen Laba.	Ditolak
H3	Jumlah Rapat Dewan Komisaris Memoderasi Pengaruh Konvergensi IFRS terhadap Manajemen Laba.	Ditolak
H4	Ukuran Dewan Komisaris Memoderasi Pengaruh Konvergensi IFRS terhadap Manajemen Laba.	Ditolak
H5	Proporsi Komite Audit Independen Memoderasi Pengaruh Konvergensi IFRS terhadap Manajemen Laba.	Ditolak
H6	Komite Audit yang Memiliki Keahlian Akuntansi dan Keuangan Memoderasi Pengaruh Konvergensi IFRS terhadap Manajemen Laba.	Diterima
H7	Jumlah Rapat Komite Audit Memoderasi Pengaruh Konvergensi IFRS terhadap Manajemen Laba.	Ditolak
H8	Kualitas Auditor Memoderasi Pengaruh Konvergensi IFRS terhadap Manajemen Laba.	Ditolak
H9	Kepemilikan Institusional Memoderasi Pengaruh Konvergensi IFRS terhadap Manajemen Laba.	Ditolak

4.3 Interpretasi Hasil

Berdasarkan pengujian hipotesis yang telah dilakukan, selanjutnya akan menjelaskan mengenai hasil uji hipotesis dan dikaitkan dengan landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini.

4.3.1 Pengaruh Konvergensi IFRS terhadap Manajemen Laba

Hasil pengujian hipotesis pertama dalam penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi IFRS sebagai standar akuntansi keuangan di Indonesia setelah *full convergence* pada tanggal 1 Januari 2012 lalu cenderung dapat meningkatkan tingkat manajemen laba perusahaan. Hal ini menunjukkan perbedaan dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ismail, dkk. (2013) pada sejumlah perusahaan di Malaysia. Selain itu implementasi IFRS sebagai standar akuntansi keuangan di Indonesia juga menunjukkan dampak yang signifikan terhadap manajemen laba.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Rudra dan Bhattacharjee (2012) yang menyatakan bahwa adopsi IFRS berpengaruh positif dan signifikan terhadap *earnings management* di perusahaan India. Menurut Ball (2006) dalam Rudra dan Bhattacharjee (2012), ketika pasar modal tidak likuid seperti di pasar negara berkembang India, manajer dapat mempengaruhi *quoted price*. Ketika nilai wajar diestimasi menggunakan model penilaian, hasilnya dapat menjadi lebih buruk, manajer dapat mempengaruhi estimasi melalui pilihan mereka pada model dan parameter. Penelitian Callao dan Jerne (2010) juga menunjukkan bahwa akrual diskresioner semakin meningkat sejak periode implementasi IFRS di Uni Eropa, sehingga dapat disimpulkan bahwa IFRS belum tentu sesuai diterapkan di negara yang memiliki karakteristik berbeda.

Adanya hasil pengujian yang mengakibatkan ditolaknya hipotesis ini diduga disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor pertama adalah pada saat periode penelitian diduga banyak perusahaan yang sedang melakukan *corporate action*

seperti IPO, *right issue*, *merger*, dan lain-lain, sehingga perusahaan cenderung berusaha untuk melakukan manipulasi yang meningkatkan kinerja laporan keuangan. Faktor kedua yaitu periode pengamatan untuk penelitian penerapan konvergensi IFRS masih berdekatan dengan penerapan pajak baru pada tahun 2010 sehingga ada kemungkinan pada tahun 2010 dan 2011 manajemen laba yang diestimasi masih terbiaskan oleh manajemen laba pajak. Faktor lain yang dapat menjadi pertimbangan adalah waktu pemberlakuan standar. Adopsi IFRS yang masih baru berlaku di Indonesia kemungkinan belum sepenuhnya dapat diterapkan secara keseluruhan dan efektif sehingga masih memungkinkan untuk terjadinya *earnings management* (Santy, 2012).

4.3.2 Pengaruh Dewan Komisaris Independen Dalam Memoderasi Konvergensi IFRS terhadap Manajemen Laba

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis kedua dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa dewan komisaris independen tidak dapat memoderasi pengaruh IFRS terhadap manajemen laba. Semakin banyak anggota dewan komisaris yang independen (tidak terafiliasi dengan pihak manajemen) ternyata tidak dapat menurunkan pengaruh positif konvergensi IFRS pada pasar berkembang di Indonesia terhadap praktik manajemen laba. Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan Klein (2002) yang menemukan adanya pengaruh negatif signifikan dewan komisaris independen terhadap manajemen laba.

Hal ini dapat dijelaskan bahwa penempatan atau penambahan anggota dewan komisaris independen dimungkinkan hanya sekedar memenuhi ketentuan formal, sementara pemegang saham mayoritas masih memegang peranan penting sehingga kinerja dewan tidak meningkat bahkan turun (Gideon, 2005) dalam Ujiyantho dan Pramuka (2007). Kondisi ini juga ditegaskan dari hasil survei Asian Development Bank dalam Gidoen (2005) dalam Ujiyantho dan Pramuka (2007) yang menyatakan bahwa kuatnya kendali pendiri perusahaan dan kepemilikan saham mayoritas menjadikan dewan komisaris tidak independen. Fungsi pengawasan yang seharusnya menjadi tanggungjawab anggota dewan menjadi tidak efektif.

Hasil penelitian yang tidak signifikan ini juga dilatar belakangi oleh adanya perusahaan yang belum mematuhi peraturan dari BAPEPAM No.Kep-305/BEJ/07-2004 yang mensyaratkan proporsi komisaris independen dalam perusahaan sekurang-kurangnya 30% dari jumlah keseluruhan dewan komisaris yang ada. Rendahnya proporsi tersebut menyebabkan proporsi komisaris independen memiliki pengaruh yang lemah terhadap fungsi monitoring manajemen perusahaan walaupun perusahaan tersebut telah mengadopsi standar pelaporan keuangan yang baru.

4.3.3 Pengaruh Jumlah Rapat Dewan Komisaris Dalam Memoderasi Konvergensi IFRS terhadap Manajemen Laba

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis ketiga dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa jumlah rapat dewan komisaris tidak dapat memoderasi

pengaruh IFRS terhadap terhadap manajemen laba pada arah yang negatif. Dewan komisaris yang semakin sering melakukan pertemuan dan rapat untuk mengawasi pihak manajemen ternyata belum dapat menurunkan pengaruh positif konvergensi IFRS pada pasar berkembang di Indonesia terhadap praktik manajemen laba. Hasil penelitian yang tidak signifikan ini menjelaskan bahwa seringkali dewan komisaris mengadakan rapat belum efektif dalam mengurangi manajemen laba setelah IFRS.

Hari (2012) dalam Prastiti dan Meiranto (2013) menemukan sebab mengapa dewan komisaris tidak dapat menekan manajemen laba dikarenakan dewan komisaris merupakan badan yang bersifat paruh waktu yang hanya bertemu sesekali dan tidak saling mengenal dengan baik satu sama lain, dan dewan komisaris kemungkinan tidak memiliki waktu dan keahlian yang diperlukan untuk memahami secara rinci bisnis perusahaan yang memungkinkan manajemen untuk mengaburkan masalah. Dengan demikian hal tersebut memicu ketidakefektifan proksi jumlah rapat dewan komisaris dalam menurunkan praktik manajemen laba setelah konvergensi IFRS.

4.3.4 Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris Dalam Memoderasi Konvergensi IFRS terhadap Manajemen Laba

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis keempat dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa ukuran dewan komisaris tidak dapat memoderasi pengaruh IFRS terhadap terhadap manajemen laba. Semakin banyak anggota dewan komisaris ternyata tidak dapat menurunkan pengaruh positif konvergensi IFRS

pada pasar berkembang di Indonesia terhadap praktik manajemen laba. Hasil penelitian yang tidak signifikan dengan arah positif ini menjelaskan bahwa ukuran dewan komisaris yang semakin besar tidak efektif dalam mengurangi manajemen laba setelah IFRS.

Menurut Yermarck (1996) dalam Jao dan Pagalung (2011), semakin banyaknya anggota dewan komisaris maka akan menyulitkan dalam peran mereka, diantaranya kesulitan dalam berkomunikasi dan mengkoordinir kerja dari masing-masing anggota dewan itu sendiri, kesulitan dalam mengawasi dan mengendalikan tindak manajemen laba, serta kesulitan dalam mengambil keputusan yang berguna bagi perusahaan. Dengan demikian ukuran dewan komisaris yang semakin besar menimbulkan banyak argumen yang berbeda, sehingga menyulitkan dewan komisaris dalam pengambilan keputusan yang efektif walaupun perusahaan telah mengadopsi standar pelaporan keuangan yang baru.

4.3.5 Pengaruh Komite Audit Independen Dalam Memoderasi Konvergensi IFRS terhadap Manajemen Laba

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis kelima dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa proporsi komite audit independen tidak dapat memoderasi pengaruh IFRS terhadap manajemen laba. Semakin banyak anggota komite audit yang independen (tidak terafiliasi dengan pihak manajemen) ternyata belum dapat menurunkan pengaruh positif konvergensi IFRS pada pasar berkembang di Indonesia terhadap praktik manajemen laba. Hasil penelitian yang

tidak signifikan ini dilatarbelakangi oleh adanya perusahaan yang belum mematuhi peraturan BAPEPAM dan LK Nomor: Kep-643/BL/2012 dalam peraturan nomor IX.1.5 yang menyatakan bahwa komite audit paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari komisaris independen dan pihak dari luar emiten atau perusahaan publik. Komite audit diketuai oleh komisaris independen.

Rendahnya atau tidak adanya anggota komite audit yang independen menyebabkan kelemahan dalam pertanggungjawaban komite audit kepada dewan komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisari. Dengan demikian komite audit independen belum dapat menurunkan pengaruh positif konvergensi IFRS terhadap manajemen laba.

4.3.6 Pengaruh Komite Audit yang Memiliki Keahlian Akuntansi dan Keuangan Dalam Memoderasi Konvergensi IFRS terhadap Manajemen Laba

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis keenam dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa komite audit yang memiliki keahlian akuntansi dan keuangan dapat memoderasi pengaruh IFRS terhadap manajemen laba dengan arah yang positif. Hal ini menunjukkan bahwa komite audit yang memiliki keahlian akuntansi dan keuangan ternyata memperkuat pengaruh positif konvergensi IFRS terhadap praktik manajemen laba. Namun, hasil penelitian ini bertentangan dengan yang diprediksikan sebelumnya. Berdasarkan kenyataan yang ada, adanya pembentukan komite audit yang mempunyai keahlian di bidang akuntansi dan

keuangan hanya bersifat *mandatory* terhadap peraturan yang berlaku (Pamudji dan Trihartati, 2009).

Menurut Sommer (1977) dalam Pamudji dan Trihartati (2009), banyak komite audit di perusahaan belum melaksanakan tugasnya dengan baik. Peraturan Bapepam juga belum dapat menjelaskan karakteristik apa sajakah yang harus dimiliki oleh seseorang agar dapat dinyatakan memiliki *financial literacy* (Pamudji dan Trihartati, 2009). Sehingga, kurang jelasnya *definisi financial literacy* yang harus dimiliki oleh anggota komite audit menyebabkan tiap perusahaan sampel kemungkinan memiliki definisi yang berbeda dalam menentukan jumlah anggota komite audit yang memiliki *financial literacy* (Fitriasari, 2007) dalam Pamudji dan Trihartati (2009). Hal tersebut memungkinkan komite audit yang terpilih tidak sesuai dengan yang diharapkan dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris dengan baik. Dengan demikian komite audit yang terpilih kemungkinan tidak bersikap profesional atas *financial literacy* yang telah ditetapkan oleh BAPEPAM. Sehingga secara tidak langsung komite audit yang mempunyai keahlian di bidang akuntansi dan keuangan tidak dapat menurunkan manajemen laba setelah IFRS dan pembentukannya hanya bersifat *mandatory* terhadap peraturan yang berlaku.

4.3.7 Pengaruh Jumlah Rapat Komite Audit Dalam Memoderasi Konvergensi IFRS terhadap Manajemen Laba

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis ketujuh dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa jumlah rapat komite audit tidak dapat memoderasi pengaruh IFRS terhadap manajemen laba. Komite audit yang semakin besar melakukan pertemuan dan mengadakan rapat ternyata belum dapat menurunkan pengaruh positif konvergensi IFRS pada pasar berkembang di Indonesia terhadap praktik manajemen laba. Hasil penelitian yang tidak signifikan ini dilatarbelakangi oleh adanya perusahaan yang belum mematuhi peraturan dari BAPEPAM dan LK Nomor: Kep-643/BL/2012 dalam peraturan nomor IX.1.5 mengenai pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit no. 7 yang menyatakan bahwa komite audit mengadakan rapat secara berkala paling kurang satu kali dalam 3 (tiga) bulan, dan keterangan lain dalam peraturan tersebut.

Ketidakhadiran anggota komite audit dalam rapat memungkinkan masalah-masalah yang terdapat dalam proses laporan keuangan tidak terungkap sehingga tidak diketahui oleh komite audit. Hal tersebut menyebabkan masalah yang ada dalam proses pelaporan keuangan tidak menemukan penyelesaian. Beberapa hal tersebut dapat memicu ketidakefektifan proksi jumlah rapat komite audit dalam menurunkan praktik manajemen laba. Penelitian ini mendukung hasil penelitian Pamudji dan Trihartati (2009) yang menyatakan bahwa frekuensi pertemuan komite audit ternyata tidak efektif mengurangi manajemen laba. Hal ini disebabkan oleh pembentukan komite audit dalam perusahaan hanya bersifat *mandatory* terhadap

peraturan yang ada. Selain itu, komite audit belum melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara maksimal sehingga fungsi dan perannya tidak efektif.

4.3.8 Pengaruh Kualitas Auditor Dalam Memoderasi Konvergensi IFRS terhadap Manajemen Laba

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis kedelapan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa kualitas auditor tidak dapat memoderasi pengaruh IFRS terhadap terhadap manajemen laba. Kualitas auditor dengan kantor akuntan publik *big four* yang memberikan layanan jasa audit pada perusahaan ternyata tidak dapat menurunkan pengaruh positif konvergensi IFRS pada pasar berkembang di Indonesia terhadap praktik manajemen laba. Hasil penelitian yang tidak signifikan ini dilatarbelakangi oleh pada saat periode penelitian banyak perusahaan yang sedang melakukan *event-event* tertentu, seperti IPO, *merger*, *right issue*, dan lain-lain, sehingga perusahaan cenderung berusaha untuk melakukan manipulasi yang meningkatkan kinerja laporan keuangan.

Bukti empiris menunjukkan bahwa adanya suatu kenaikan permintaan terhadap kualitas audit pada saat IPO. Perusahaan sering menggantikan auditor dan memilih auditor Big Five pada saat IPO (Carpenter dan Strawser, 1971; Menon dan Williams, 1991 dalam Rohaeni dan Aryati, 2011). Selain itu menurut Rohaeni dan Aryati (2011) pengaruh positif variabel interaksi IFRS dengan kualitas audit terhadap *income smoothing* juga dapat disebabkan dengan adanya *audit failures*. *Audit failure* terjadi ketika auditor menyatakan opini audit yang salah karena pelaksanaan audit tidak sesuai dengan standar auditing. Bentuk-bentuk *audit*

failures tersebut terjadi pada sejumlah perusahaan terkemuka seperti Enron, Xerox, Tyco dan Worldcom yang melibatkan banyak pihak dan berdampak luas.

4.3.9 Pengaruh Kepemilikan Institusional Dalam Memoderasi Konvergensi IFRS terhadap Manajemen Laba

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis kesembilan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional tidak dapat memoderasi pengaruh IFRS terhadap manajemen laba. Kepemilikan saham oleh institusi yang diyakini memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak manajemen ternyata belum dapat menurunkan pengaruh positif konvergensi IFRS pada pasar berkembang di Indonesia terhadap praktik manajemen laba. Dengan demikian penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Madiastuty dan Mahfoedz (2003) yang menyatakan bahwa investor institusional dianggap sebagai *sophisticated investor* dengan jumlah kepemilikan yang cukup signifikan sehingga dapat memonitor manajemen perusahaan yang pada akhirnya akan mengurangi motivasi manajer untuk melakukan manajemen laba.

Hasil penelitian ini sejalan dengan pandangan atau konsep yang mengatakan bahwa institusional adalah pemilik yang lebih memfokuskan pada *current earnings* (Porter, 1992 dalam Ujiyantho & Pramuka, 2007). Akibatnya manajer terpaksa untuk melakukan tindakan yang dapat meningkatkan laba jangka pendek, misalnya dengan melakukan manipulasi laba. Pandangan yang sama juga dikemukakan oleh Cornett, dkk., (2006) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional akan membuat manajer merasa terikat untuk memenuhi target laba dari para investor,

sehingga mereka akan tetap cenderung terlibat dalam tindakan manipulasi laba. Dengan demikian kepemilikan institusional tidak signifikan menurunkan manajemen laba setelah implementasi IFRS di Indonesia.